

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

TANGGAP TANGKAS TANGGUH

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

📍 Jln. Siraman – Pulutan, Besari, Siraman, Wonosari

✉ bpbd@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id/>

☎ 0811 265 7113 - 0274 394091



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERITAH

(LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

Kata Pengantar



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada jajaran instansi pemerintah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya. LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Harapan kami kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran yang kami perlukan guna penyempurnaan penyusunan LKjIP ini.

Salam tangguh, salam siaga, salam kemanusiaan, siap untuk selamat.

Gunungkidul, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA



Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BPBD yang dihasilkan di tahun 2025, digambarkan dalam realisasi sasaran strategis yang merupakan salah satu IKU nya Bupati Gunungkidul, yakni Indeks Kapasitas Daerah / Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “ Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat”
 - a. Diukur dengan indikator presentase kalurahan rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana (jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dikali 100%).
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penanggulangan Bencana. Dimana sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah kalurahan tangguh bencana yang terbentuk sebanyak 90 kalurahan.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 61,81%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 62,50%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Presentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,11%.

- d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 61,11% terjadi peningkatan sebesar 1,39%
- 2. Capaian sasaran strategis 2 “Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran”
 - a. Diukur dengan indikator presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani (jumlah kejadian bencana/kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana/kebakaran dikali 100%)
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Presentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - d. Sedangkan capaian target tahun 2024 sebesar 100%.
- 3. Capaian sasaran strategis 3 “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD”
 - a. Indikator sasaran yang ingin dicapai dari sasaran strategis adalah Nilai AKIP PD. Capaian indikator dimaksud didukung kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 yaitu 83. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, menunjukkan bahwa nilai AKIP BPBD adalah 83,73. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Presentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,89%.
 - c. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 83,61 terjadi peningkatan sebesar 0,12%.
- 4. Capaian sasaran strategis 4 “ Peningkatan Dukungan Tata Ruang Keistimewaan Terhadap Penanggulangan Bencana”

- a. Indikator sasaran yang ingin dicapai dari sasaran strategis adalah presentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana (jumlah realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang dibagi jumlah target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dikalikan 100%)
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 yaitu 75. Namun pada tahun anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Keistimewaan. Sehingga pada tahun anggaran 2025 capaian sasaran strategis ke-4 ini tidak tercapai.
5. IKU Bupati : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
- a. Pada tahun 2025 target nilai IKD di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,80, dan berdasarkan hasil penilaian nilai IKD Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 adalah 0,81. Sedangkan nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 adalah 86,94.
 - b. Capaian nilai IKD pada tahun 2024 sebesar 0,77, sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,04
6. SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran
- a. Capaian SPM Sub Urusan Bencana didukung oleh kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada tahun 2025 adalah 98,55 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pelayanan informasi rawan bencana : 100%
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 97,64%
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 98,00%
 - b. Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran didukung oleh kegiatan pemenuhan *response time*, SOP, Sarana prasarana pemadam kebakaran, SDM,

pelayanan pemadaman dan penyelamatan. Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran tahun 2025 adalah sebesar 96,94%.

- c. Dibandingkan dengan tahun 2024, capaian SPM sub urusan bencana mengalami kenaikan sebesar 1,32%, sedangkan capaian SPM sub urusan kebakaran mengalami penurunan sebesar 0,14%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

- a. Risiko dan kerentanan bencana di Kabupaten Gunungkidul yang cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
- b. Kapabilitas dan kapasitas dalam menghadapi bencana di Kabupaten Gunungkidul belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.
- c. Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholders belum maksimal
- d. Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk diantaranya bencana non alam, seperti wabah penyakit/epidemi ataupun bencana karena kegagalan teknologi.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan/kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut. Sebagai berikut:

- 1. Masih kurangnya dokumen atau regulasi terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi.

Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul yang sudah dilegalkan adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran;

- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

Dokumen yang sudah disusun tetapi belum dilegalisasi adalah :

- a. Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) 2022-2027;
 - b. Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
 - c. Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor;
 - d. Rencana Kontingensi Bencana Banjir;
 - e. Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan;
 - f. Rencana Kontingensi Bencana Tsunami;
 - g. Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - h. Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem;
 - i. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
2. Peraturan Daerah yang disusun di tahun 2025 antara lain :
 - a. Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran (sudah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2025)
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagai revisi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Belum ditetapkan, dan diharapkan menjadi prioritas kegiatan di tahun 2026 terkait penanggulangan bencana khususnya pada tahapan prabencana.
 3. Ketersediaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/pos pemadam kebakaran belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).
 4. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi.
 5. Belum optimalnya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Begitu juga untuk Kalurahan Tangguh

Bencana, sampai tahun 2025 dari 144 kalurahan baru 90 kalurahan yang menjadi kalurahan tangguh bencana.

6. Kurangnya dukungan untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), khususnya ewa tanah longsor.
7. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kalurahan dan penguatan tata kelola pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (RPBBK) yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.
3. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana
4. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana
5. Penguatan data, informasi, sistem, regulasi dan tata kelola bencana
6. Peningkatan kuantitas, kapasitas, dan kompetensi SDM BPBD

Adapun Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 8.709.563.392,- terealisasi Rp 8.044.997.384,- atau 92,37%.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Tujuan	4
2. Cascading Kinerja	4
Visi Misi	4
3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Pohon Kinerja	7
Mandat Kinerja	7
Proses Bisnis	7
Pohon Kinerja	8
4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Peta Jabatan	9
Struktur Organisasi	9
Tugas dan Fungsi	10
Peta Hubungan Proses Bisnis	13
5. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	14
6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran	15
Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Kerja	16
Analisa Pengarusutamaan Gender (PUG)	18
Dukungan Sarana dan Prasarana	21
Dukungan Anggaran	26
7. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	32
Visi dan Misi Kepala Daerah	32
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
2. Strategi dan Arah Kebijakan	36
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	38
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
Capaian Kinerja Tahun 2025	47
Sasaran Strategis : Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, dan Responsif Meningkatkan	47
Program Kegiatan Guna Pencapaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, Dan Responsif Meningkatkan	49
Tahap Pra Bencana	49
Tahap Tanggap Darurat	60
Tahap Pasca Bencana	65
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	66

Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana.....	67
Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	69
Sasaran Strategis : Peningkatan Manajemen Pengurangan Bencana/Kebakaran	71
Program Kegiatan Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran	75
Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul	75
Kegiatan Penyelamatan Non Kebakaran.....	76
Peningkatan Kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran	77
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.....	78
Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	719
Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis	81
Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	85
IKU BUPATI : Indeks Ketahanan Daerah (IKD).....	86
Indeks Risiko Bencana (IRB)	89
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran ...	91
Realisasi dan Efisiensi Anggaran	98
Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif dan Responsif Meningkat.....	98
Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran ..	99
Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	101
Inovasi	102
Penghargaan Yang Diperoleh	103
BAB IV PENUTUP	104
Kesimpulan.....	104
Langkah Perbaikan Kinerja.....	105
LAMPIRAN.....	106

Daftar Tabel

Tabel 1 1. Data Persebaran dan Luas Wilayah di Kabupaten Gunungkidul	6
Tabel 1 2. Tugas dan Fungsi Bidang dan Unit Pelaksana Teknis	11
Tabel 1 3. Jumlah Sumber Daya Manusia	15
Tabel 1 4. Peta Jabatan PNS BPBD Kabupaten Gunungkidul.....	15
Tabel 1 5. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Kelas Jabatan	15
Tabel 1 6. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	16
Tabel 1 7. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	19
Tabel 1 8. Ketersediaan Sarana Prasarana PB	22
Tabel 1 9. Sarana Prasarana SPM Sub Urusan kebakaran	23
Tabel 1 10. Daftar Hasil Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 1 11. Anggaran Tahun 2025.....	26
Tabel 1 12. Dukungan Anggaran Pemenuhan Sasaran Strategis.....	27
Tabel 1 13. Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2025	28
Tabel 1 14. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	31
Tabel 2 1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026	33
Tabel 2 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada BPBD	34
Tabel 2 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	35
Tabel 2 4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel 2 5. Indikator Kinerja Program.....	37
Tabel 2 6. Struktur Program Dan Kegiatan Yang Terkait Langsung Pencapaian Sasaran	38
Tabel 2 7. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran tahun 2025.....	39
Tabel 2 8. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	40
Tabel 2 9. Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	41
Tabel 2 10. Dukungan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis	42
Tabel 3 1. Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	48
Tabel 3 2. Capaian Indikator Kinerja Utama/IKU	48
Tabel 3 3. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel 3 4. Capaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, Dan Responsif Meningkatkan	48
Tabel 3 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 Serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026	48
Tabel 3 6. Rekapitulasi penerima layanan sosialisasi KIE	50
Tabel 3 7. Pemasangan Rambu Kebencanaan	51
Tabel 3 8. Daftar Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Gunungkidul	52
Tabel 3 9. Satuan Pendidikan pada Kabupaten Gunungkidul	57
Tabel 3 10. Daftar SPAB di Kabupaten Gunungkidul	57
Tabel 3 11. Gladi Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2025	60
Tabel 3 12. Data Kejadian Bencana Tahun 2025	61
Tabel 3 13. Data Korban Bencana Tahun 2025.....	62
Tabel 3 16. Rekap Data Potensi Kekeringan Periode Januari S.D Desember 2025	63
Tabel 3 17. Realisasi Dropping Air Tahun 2025	64
Tabel 3 18. Realisasi Anggaran Penanganan Pasca Bencana	65

Tabel 3 19. Daftar Kaltana yang Memiliki Dokumen dan Sarpras PB Lengkap	68
Tabel 3 20. Daftar Kaltana yang Tidak Memiliki Dokumen dan Sarpras PB	69
Tabel 3 21. Jumlah Pos, Kendaraan dan SDM Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul	72
Tabel 3 22. SDM Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul	73
Tabel 3 23. Daftar Personil Yang Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran	73
Tabel 3 24. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	74
Tabel 3 25. Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	75
Tabel 3 26. Rincian Rata-Rata Waktu Tanggap/Respon Time	76
Tabel 3 27. Daftar Personil Yang Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran	77
Tahun 2025	77
Tabel 3 28. Pembentukan Relawan Kebakaran Tahun 2025	77
Tabel 3 29. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	82
Tabel 3 30. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	83
Tabel 3 31. Analisis Perhitungan Capaian Kinerja	83
Tabel 3 32. Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	84
Tabel 3 33. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025	86
Tabel 3 34. Indeks Prioritas Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	88
Tabel 3 35. Nilai IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2025	89
Tabel 3 34. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	90
Tabel 3 37. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul di Banding Rata- Rata Nasional	90
Tabel 3 38. Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025	91
Tabel 3 39. Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025	97
Tabel 3 40. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana yang Terencana, Integratif, dan Responsif Meningkatkan	98
Tabel 3 41. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif dan Responsif Meningkatkan... ..	99
Tabel 3 42. Realisasi Anggaran Program Sasaran Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	99
Tabel 3 43. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran	100
Tabel 3 44. Anggaran dan Realisasi Serapan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025	101
Tabel 3 45. Analisis efisiensi	101

Daftar Gambar



Gambar 1 1. Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul	5
Gambar 1 2. Mandat Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul	7
Gambar 1 3. Peta Proses Bisnis	7
Gambar 1 4. Pohon Kinerja	8
Gambar 1 5. Struktur Organisasi BPBD	9
Gambar 1 6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran	10
Gambar 1 7. Peta Hubungan Proses Bisnis	13
Gambar 1 8. Pemenuhan Anjab Tahun 2025	17
Gambar 1 9. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	18
Gambar 1 10. Komposisi ASN BPBD Gunungkidul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan ..	20
Gambar 1 12. Nilai AKIP BPBD Tahun 2024	31
Gambar 2 1. Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025	41
Gambar 2 2. e-gov.gunungkidulkab.go.id	43
Gambar 2 3. https://eplan-ng.gunungkidulkab.go.id/	43
Gambar 2 4. https://sipd-ri.kemendagri.go.id	43
Gambar 2 5. https://lpse.gunungkidulkab.go.id/	44
Gambar 2 6. https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id	44
Gambar 2 7. https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/	44
Gambar 2 8. https://srikandi.arsip.go.id/auth/login	44
Gambar 2 9. https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home	45
Gambar 2 10. https://inarisk.bn timer.go.id/irbi#	45
Gambar 2 11. Media Informasi BPBD	46
Gambar 3 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024	49
Gambar 3 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025	49
dan Target Renstra	49
Gambar 3 3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Tahun 2025	50
Gambar 3 4. Rambu evakuasi	51
Gambar 3 5. Pelaksanaan Pembentukan Kaltana di Kalurahan Jetis	51
Gambar 3 9. Pembentukan SPAB Berdasarkan Satuan Pendidikan	59
Gambar 3 10. Kegiatan Tim Reaksi Cepat	59
Gambar 3 11. Rekapitulasi data kejadian bencana Tahun 2025 Per Kapanewon	60
Gambar 3 12. Foto dokumentasi bencana	63
Gambar 3 13. Foto dokumentasi dropping logistik	63
Gambar 3 14. Stimulan Pasca Bencana	66
Gambar 3 15. Forum FPRB	67
Gambar 3 16. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kaltana Tahun 2025	69
Gambar 3 17. Dokumentasi Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran	75
Gambar 3 18. Grafik Kejadian Kebakaran Pada Setiap Kapanewon Tahun 2025	75
Gambar 3 19. Jenis Kegiatan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2025	76

Gambar 3 25. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Capaian Kinerja.....	85
Gambar 3 26. Indeks Ketahanan Daerah Spesifik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	87
Gambar 3 27. Indeks Per Komponen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	87
Gambar 3 28. Tingkat Kapasitas Gunungkidul dalam Menghadapi Bencana.....	89
Gambar 3 29. Indeks Risiko Bencana Rata-Rata Nasional.....	90
Gambar 3 30. Dashboard EWS Tsunami.....	102
Gambar 3 32. Penghargaan yang Diperoleh	103

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem dalam SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat pada organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.



Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul.
2. Mendorong BPBD Kabupaten Gunungkidul di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Gunungkidul di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Cascading Kinerja



Visi Misi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ingin dicapai selama lima tahun yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026:

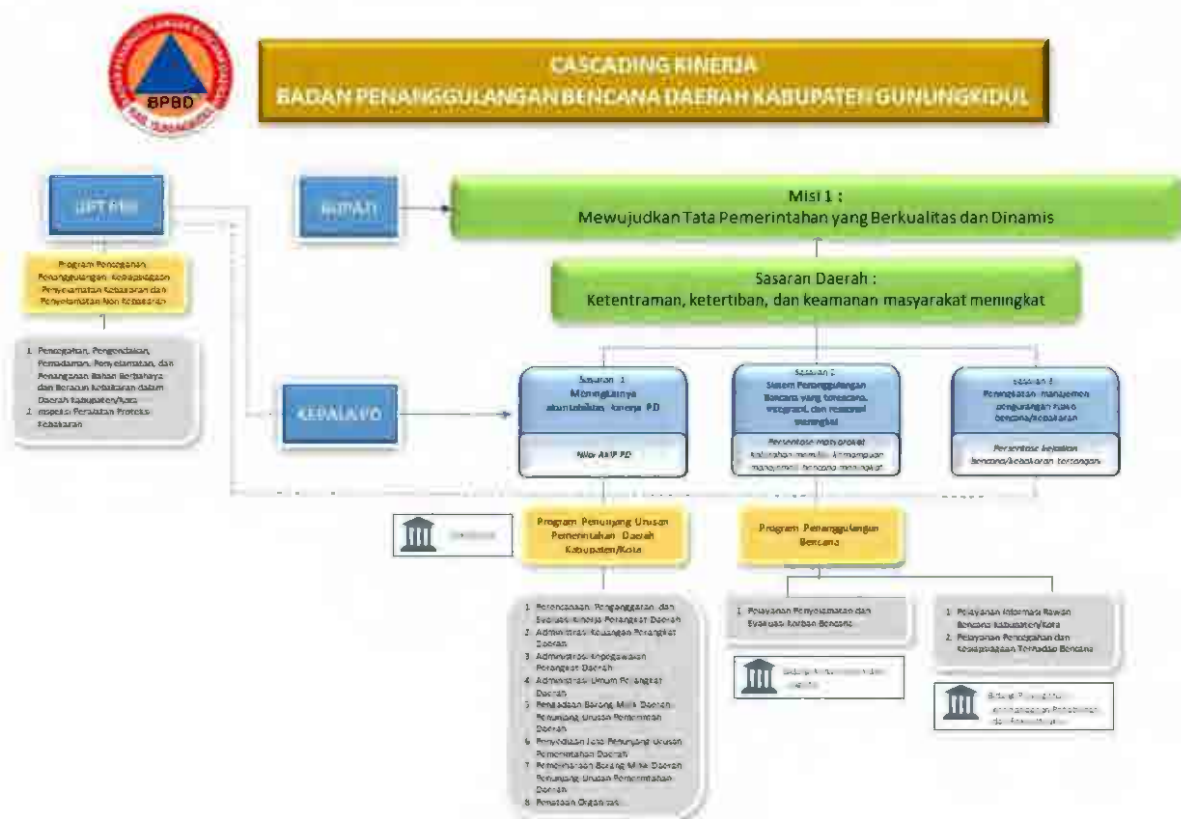
- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.
- b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 maka Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah “ Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Guna mewujudkan Visi Kabupaten Gunungkidul tersebut telah ditetapkan misi-misi. Ada 6 (enam) Misi,

BPBD Kabupaten Gunungkidul mendukung capaian Misi No 6 yaitu: Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1 1. Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka BPBD mengemban isu strategis nasional berupa pengurangan risiko bencana. Sedangkan isu strategis daerah yang diemban BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana.



Pembagian Wilayah Organisasi

Kabupaten Gunungkidul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah seluas 1.485,36 km², secara astronomis terletak pada 7° 46' - 8° 09' LS dan 110° 21' – 110° 50' BT dengan batas-batas administratif sebelah utara adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah timur adalah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Di Yogyakarta.

Dalam penanganan kebencanaan, BPBD Kabupaten Gunungkidul juga berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian bencana di kabupaten/kota sekitarnya maupun luar daerah yang di koordinir oleh BPBD Provinsi DIY.

Tabel 1 1. Data Persebaran dan Luas Wilayah di Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Ibukota Kapanewon	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase	Jumlah Kalurahan
1	Panggang	Giriharjo	99,80	6,72	6
2	Purwosari	Giritirto	71,76	4,83	5
3	Paliyan	Karangduwet	58,07	3,91	7
4	Saptosari	Kepek	87,83	5,91	7
5	Tepus	Sidoharjo	104,91	7,06	5
6	Tanjungsari	Kemiri	71,63	4,82	5
7	Rongkop	Semugih	83,46	5,62	8
8	Girisubo	Jerukwudel	94,57	6,37	8
9	Semanu	Semanu	108,39	7,30	5
10	Ponjong	Ponjong	104,49	7,03	11
11	Karangmojo	Gedangrejo	80,12	5,39	9
12	Wonosari	Kepek	75,51	5,08	14
13	Playen	Ngawu	105,26	7,09	13
14	Patuk	Patuk	72,04	4,85	11
15	Gedangsari	Hargomulyo	68,14	4,59	7
16	Nglipar	Nglipar	73,87	4,97	7
17	Ngawen	Kampung	46,59	3,14	6
18	Semin	Semin	78,92	5,31	10
Kab Gunungkidul			1.485,36	100	144

3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Pohon Kinerja

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain pohon kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul tersaji dalam gambar berikut:



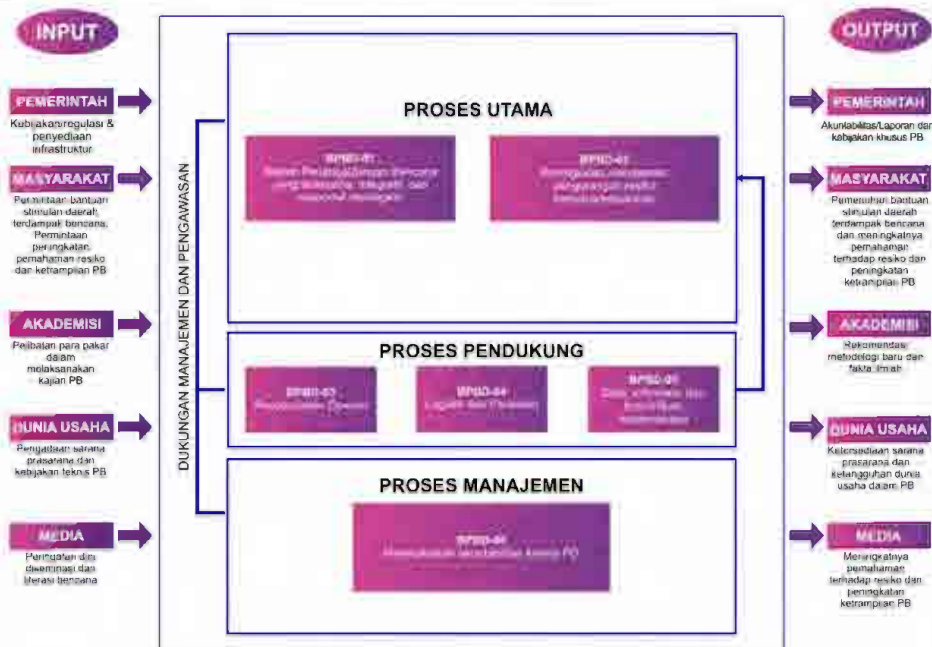
Mandat Kinerja

Gambar 1 2. Mandat Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul



Proses Bisnis

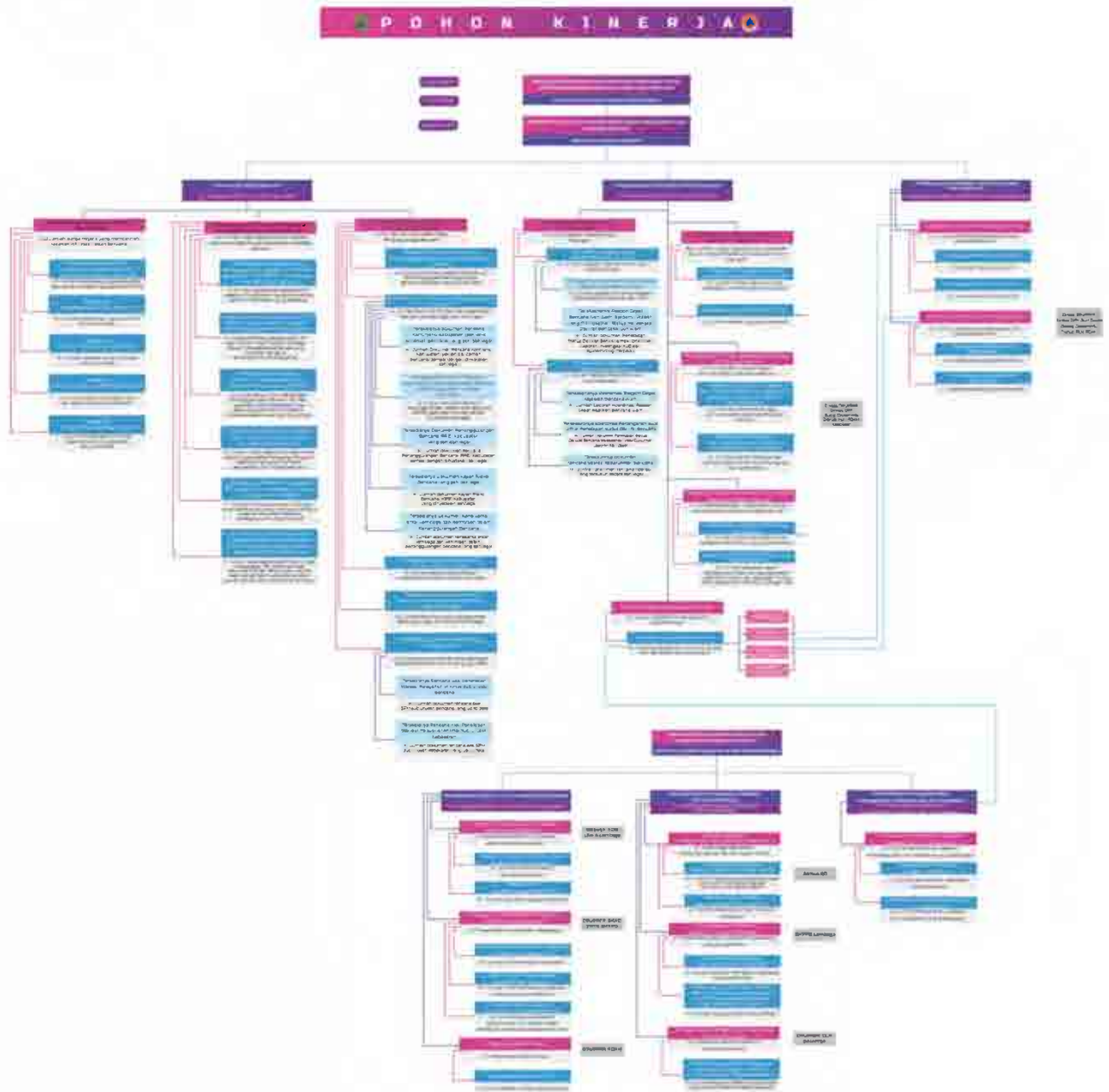
Gambar 1 3. Peta Proses Bisnis





Pohon Kinerja

Gambar 1 4. Pohon Kinerja



4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Peta Jabatan



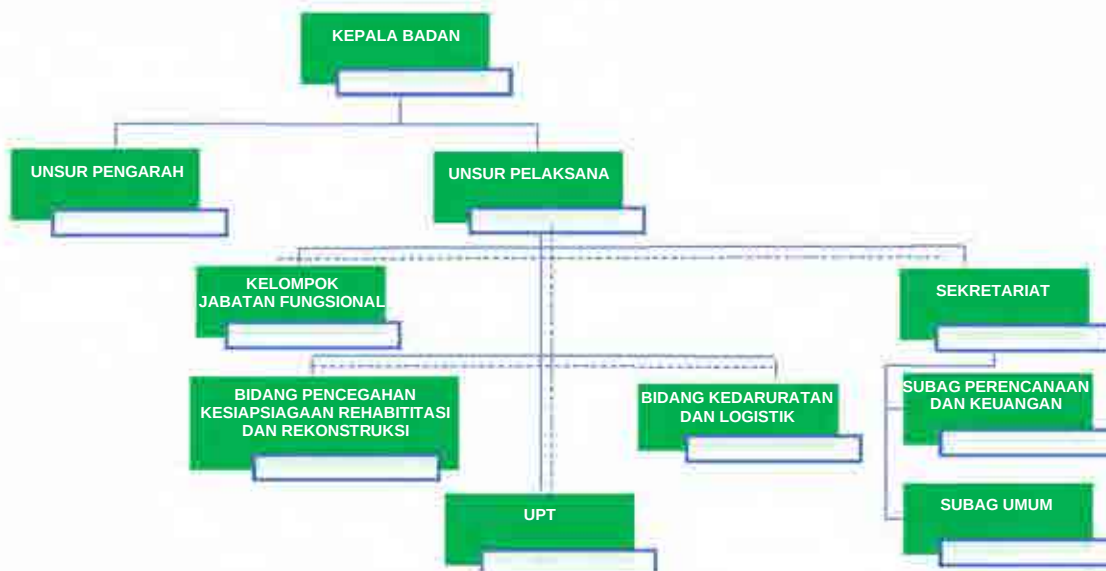
Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, struktur organisasi BPBD, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum; dan
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. UPT; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

Gambar 1 5. Struktur Organisasi BPBD



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. UPT Pemadam Kebakaran ini merupakan UPT kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Gambar 1 6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran



Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) BPBD Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- 2) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, fungsi BPBD, antara lain:

- 1) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- 4) penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha

- penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 5) penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - 7) penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - 8) pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 9) pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - 10) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 11) pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 12) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 13) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
 - 14) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
 - 15) pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
 - 17) pengelolaan UPT.

Tabel 1 2. Tugas dan Fungsi Bidang dan Unit Pelaksana Teknis

No	Bidang	Tugas	Fungsi
1	Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Perbub 44/2023)	Mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan,	a. penyusunan rencana Bidang PKRR; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

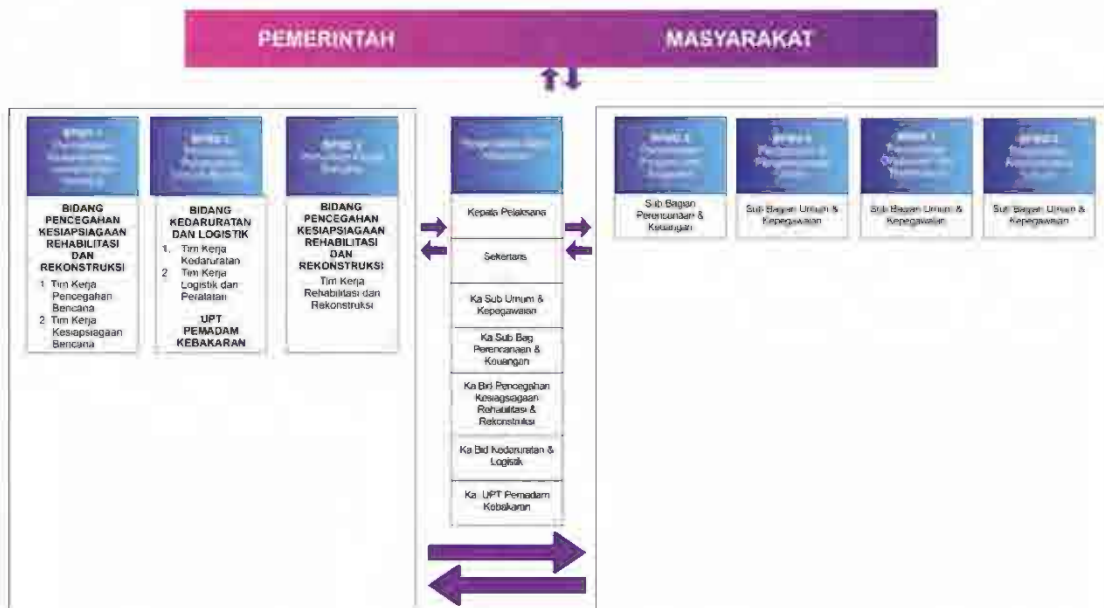
No	Bidang	Tugas	Fungsi
		rehabilitasi, dan rekonstruksi	c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; d. pelaksanaan tugas bidang pencegahan bencana; e. pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan bencana; f. pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang PKRR; h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang PKRR; i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang PKRR
2	Bidang Kedaruratan dan Logistik (Perbub 44/2023)	Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.	a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik; c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana; d. penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik serta peralatan penanggulangan bencana; e. pelaksanaan tugas bidang kedaruratan; f. pelaksanaan tugas bidang logistik dan peralatan g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik; h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kedaruratan dan Logistik; i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik; dan j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.
3	UPT Pemadam Kebakaran (Perbub 62/2023)	Menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan	a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran; b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran; c. pelaksanaan pemadaman kebakaran;

No	Bidang	Tugas	Fungsi
		darurat jiwa dan manusia hewan.	d. penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; e. pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; f. pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan hewan yang terancam keselamatannya dan memerlukan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran; g. pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran; h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran; i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pemadam Kebakaran; j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; dan k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.



Peta Hubungan Proses Bisnis

Gambar 1 7. Peta Hubungan Proses Bisnis



5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis yang melingkup BPBD Kabupaten Gunungkidul antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Efektivitas koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana
- c. Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana disisi lain pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang. Diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- d. Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul penting untuk menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Belum terpenuhinya semua regulasi yang diperlukan dalam penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul

Sedangkan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, BPBD menempati posisi strategis karena mengampu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah, yakni Indeks Ketahanan Daerah (IKD) / Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 0,81 (sedang).

Langkah atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjawab aspek strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- c. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
- d. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik

- e. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- f. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran



Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2025, jumlah pegawai BPBD sebanyak 92 (sembilan puluh dua).

Tabel 1 3. Jumlah Sumber Daya Manusia

PNS	CPNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	SDM yang masuk database BKN /JLOP	SDM yang tidak masuk dalam database BKN	Outsourcing	
						Sopir UPT PBK	Kebersihan
18	1	13	45	2	2	8	2

Tabel 1 4. Peta Jabatan PNS BPBD Kabupaten Gunungkidul

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1 orang
2	Jabatan Administrator	4 orang
3	Jabatan Pengawas	4 orang
4	Jabatan Fungsional	3 orang
5	Jabatan Pelaksana	6 orang
6	PPPK	13 orang
Jumlah		31 orang

Tabel 1 5. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Kelas Jabatan

No	Kategori	Golongan/Ruang										Kelas Jabatan		
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	9	7	5
1	Eselon II b													
2	Eselon II a										1			
3	Eselon III a								1					
4	Eselon III b							1	2					
5	Eselon IV a/ Setara			1		1	1	1	2					
6	Eselon IV b						1							
7	Fungsional Umum	1	2		2	1								
8	PPPK											3	2	8
Jumlah		1	2	1	2	2	2	2	5		1	3	2	8

Tabel 1 6. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Kategori	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		L	P	SMP	SLTA	DIII	S1 / DIV	S2
1	Eselon II b							
2	Eselon II a	1						1
3	Eselon III a	1						1
4	Eselon III b	3					1	2
5	Eselon IV a/ Setara	4	2			2	1	3
6	Eselon IV b	1					1	
7	Fungsional Umum	3	3		3	3	0	
8	PPPK	13			8	2	3	
Jumlah		26	5		11	7	6	7

Meskipun secara jumlah pegawai laki-laki masih dominan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan langkah nyata dalam penerapan pengarusutamaan gender (PUG) melalui keterlibatan aktif pegawai perempuan dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana/kebakaran di Kabupaten Gunungkidul. Kehadiran petugas perempuan dalam penanggulangan bencana/kebakaran memberikan dimensi humanis dan empatik dalam pendekatan BPBD terhadap korban bencana, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Hal ini menjadikan kegiatan BPBD lebih responsif gender.



Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Kerja

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 151/KPTS/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Keputusan ini merupakan dasar dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur sipil negara.

Dibandingkan dengan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dan Formasi Eksisting ASN, di BPBD masih mengalami kekurangan ASN. Gap antara jumlah personil BPBD berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan eksisting tergambar pada tabel di bawah ini:

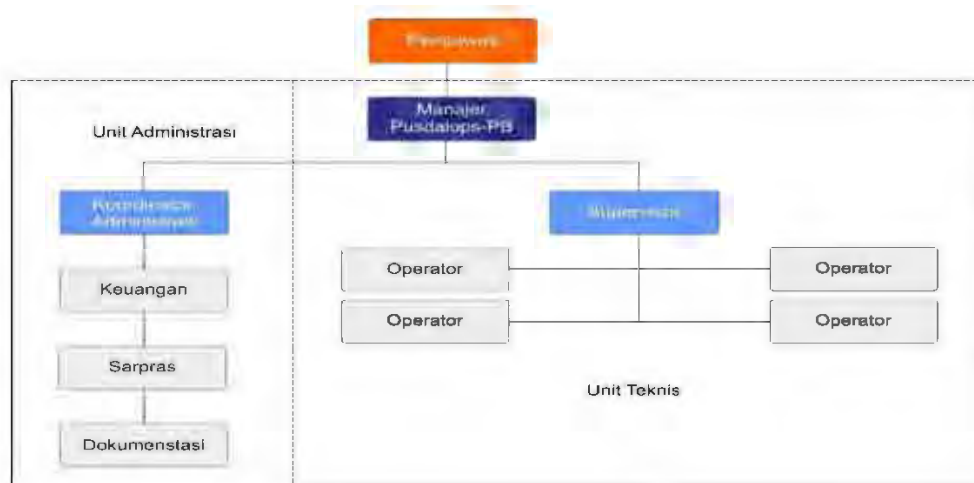
Gambar 1 8. Pemenuhan Anjab Tahun 2025



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), bahwa BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). Peraturan tersebut mengatur bahwa tugas Pusdalops-PB diantaranya sebagai pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan. Pusdalops-PB juga bertanggungjawab mengelola data dan informasi hingga menyebarkanluaskan kepada pejabat berwenang maupun

masyarakat melalui media. Pusdalops PB yang dibentuk hendaknya memegang kuat prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. Pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pusdalops-PB di BPBD berada di bawah komando Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Gambar 1 9. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)



Dari data kepegawaian BPBD Kabupaten Gunungkidul, UPT Pemadam Kebakaran telah melaksanakan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan mengirimkan pegawai untuk mendapatkan sertifikat pemadam I yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri yang diikuti oleh 14 orang.

Analisa Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Tabel 1 7. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

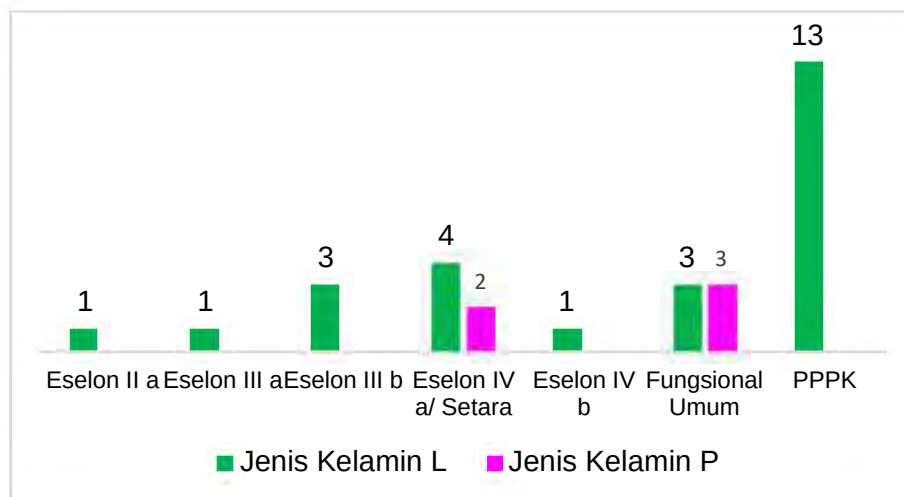
No	Kategori	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		L	P	SMP	SLTA	DIII	S1 / DIV	S2
1	Eselon II b							
2	Eselon II a	1						1
3	Eselon III a	1						1
4	Eselon III b	3					1	2
5	Eselon IV a/ Setara	4	2			2	1	3
6	Eselon IV b	1					1	
7	Fungsional Umum	3	3		3	3	0	
8	PPPK	13			8	2	3	
Jumlah		26	5		11	7	6	7

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat pendidikan SDM BPBD Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, dengan komposisi jenjang jenjang pendidikan

S2 sebanyak 7 orang (22,58%), S1 sebanyak 6 orang (19,35%), D2/3 sebanyak 7 orang (22,58%), dan SLTA sebanyak 11 Orang (35,48%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 26 orang dan jumlah pegawai perempuan 5 orang, 2 orang perempuan diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Gambar 1 10. Komposisi ASN BPBD Gunungkidul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan



Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

- a. Ruang laktasi berukuran 9 m², yang bersih, nyaman dan aman
- b. Bangunan ramah disabilitas
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang kerja
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan

Gambar 1 11. Sarana Pendukung Pengarusutamaan Gender



Selain fasilitas yang ramah disabilitas, BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan kaum perempuan dan penyandang disabilitas.

Gambar 1 12. Kegiatan Pendukung Pengarusutamaan Gender



Dukungan Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Gunungkidul mengampu 2 (dua) Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yaitu SPM urusan bencana dan urusan pemadaman kebakaran. Guna pemenuhan SPM tersebut dibutuhkan sarana prasarana yang memadai,

namun karena keterbatasan anggaran sebagian besar sarana prasarana tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana

Ketersediaan sarana prasarana berdasarkan standarisasi peralatan penanggulangan bencana sesuai Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 1 8. Ketersediaan Sarana Prasarana PB

No	Nama Alat	Fungsi	Jumlah Minimal (Standar PERKA BNPB No. 17, 2009) untuk Wilayah DIY	Satuan	Jumlah tersedia saat ini	Satuan
1	Mobil Komando	Alat Transportasi	5	Unit	1	Unit
2	Mobil Ambulance	Alat Transportasi	5	Unit	2	Unit
3	Mobil Rescue	Alat Transportasi	5	Unit		Unit
4	Mobil Operasional	Alat Transportasi	5	Unit	9	Unit
5	Mobil Truk	Alat Transportasi	2	Unit		Unit
6	Mobil Dapur umum Lapangan	Alat Transportasi	3	Unit		Unit
7	Mobil BBM	Alat Transportasi	1	Unit		Unit
8	Mobil Tangki Air	Alat Transportasi	2	Unit	7	Unit
9	Perahu Karet	Alat Transportasi	15	Unit		Unit
10	Perahu Karet Bermesin	Alat Transportasi	5	Unit	1	Unit
11	Pelampung	Alat Khusus SAR	50	Unit	3	Unit
12	Mesin Pompa Air	Alat Pendukung	3	Unit	1	Unit
13	Mesin Penyedot Air	Alat Pendukung	3	Unit		Unit
14	Mesin Fogging	Alat Pendukung	5	Unit	1	Unit
15	Chainsaw	Alat Khusus SAR	5	Unit	10	Unit
16	Vertical Rescue	Alat Khusus SAR	15	Unit	48	Unit
17	Hand Sprayer	Alat Pendukung	5	Unit		Unit
18	Dump Truck	Alat Pendukung	1	Unit		Unit
19	Beco	Alat Pendukung	1	Unit		Unit
20	Buldozer	Alat Pendukung	1	Unit		Unit
21	Scope Loader	Alat Pendukung	1	Unit		Unit
22	Bronjong	Alat Pendukung	500	Unit	40	Unit
23	Tenda Komando	Alat Berlindung, Shelter	1	Unit	17	Unit
24	Tenda Peleton	Alat Berlindung, Shelter	5	Unit		Unit
25	Tenda Regu	Alat Berlindung, Shelter	70	Unit		Unit

No	Nama Alat	Fungsi	Jumlah Minimal (Standar PERKA BNPB No. 17, 2009) untuk Wilayah DIY	Satuan	Jumlah tersedia saat ini	Satuan
26	Tenda Keluarga	Alat Berindung, Shelter	100	Unit	3	Unit
27	Tenda Posko Kesehatan	Alat Berindung, Shelter	5	Unit		Unit
28	Truk Trailer	Alat Transportasi	2	Unit		Unit
29	Motor Trail	Alat Transportasi	10	Unit	6	Unit
30	Mobile Water Treatment	Unit Pengolahan Air Kotor / water treatment portable	3	Unit	1	Unit
31	Toilet Mobile	Alat Pendukung	3	Unit		Unit
32	Water Pillow	Alat Pendukung	100	Unit		Unit
33	Instalasi Penjernih Air	Alat Pendukung	1	Unit		Unit
34	Velbed	Alat Pendukung	100	Unit	15	Unit
35	Dapur Umum	Alat Pendukung	3	Unit		Unit
36	Alat Komunikasi	Alat Komunikasi dan Elektronika	5	Unit	15	Unit
37	Genset + lampu sorot	Alat Pendukung	5	Unit	3	Unit
38	Peralatan Tukang Kayu	Alat Pendukung	100	Unit	11	Unit
39	Peralatan Tukang Batu	Alat Pendukung	100	Unit	1	Unit
40	Peralatan Tukang Elektronik	Alat Pendukung	50	Unit	25	Unit
41	Mega Phone	Alat Komunikasi dan Elektronika	5	Unit	1	Unit
42	Jaws of Life	Alat Pendukung	5	Unit		Unit
43	Life Detector	Alat Pendukung	7	Unit		Unit
TOTAL			1.318	Unit	221	Unit

2. Sarana prasarana pemadam kebakaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan sub urusan kebakaran wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Tabel 1 9. Sarana Prasarana SPM Sub Urusan kebakaran

NO	SARPRAS	JUMLAH
1	Pos Pemadam	2
2	Mobil Pemadam	4
3	Mobil Suplay	4

NO	SARPRAS	JUMLAH
4	Sepeda Motor	1
5	Mobil Rescue	2
6	Baju Tahan Panas	15
7	Baju Rescue	3
8	Kacamata Google	5
9	Sepatu Pemadam	8
10	Helm	12
11	Nozel	10
12	Apar	8
13	Tongkat Pengait	2
14	Gergaji	1
15	Chainsaw	4
16	Tower Komunikasi	1
17	Handy Talki	4
18	Senter	2
19	Tali Sling	2
20	Webbing Strap	2
21	Tempat Tidur	4
22	Pc	3
23	Laptop	1
24	Handphone	1
25	Kursi Rapat	20
26	Kursi Tamu	2
27	Meja	8
28	Lemari Kayu	2
29	Lemari Metal	3
30	Mesin Ketik Manual	1
31	Tong Sampah	2
32	Pompa Air	2
33	Genset Portabel	1
34	Tangga Aluminium	1
35	Scba	2
36	Linggis	1
37	Jangkar	1
38	Baju Anti Tawon	2
JUMLAH		149



Tabel 1 10. Daftar Hasil Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Barang Yang Dibeli	Jumlah	
		Banyaknya Barang	Harga Perolehan
	PERALATAN DAN MESIN	106	590.132.294,00
1	Genset	1	55.944.000,00
2	Mesin Gergaji	2	10.799.966,00
3	Lemari Besi/Metal	1	2.499.999,00
4	Rak Besi	11	31.249.994,00
5	Rak Besi	10	20.789.190,00
6	Filing Cabinet Besi	1	3.174.999,00
7	Filing Cabinet Kayu	1	1.674.999,00
8	Lemari Kaca	1	3.300.000,00
9	CCTV - Camera Control Television System	1	20.857.500,00
10	CCTV - Camera Control Television System	3	11.655.000,00
11	Papan Visual/Papan Nama	1	4.999.995,00
12	Meja Kerja Kayu	4	4.000.000,00
13	Sice	1	5.990.000,00
14	Kasur/Spring Bed	1	3.000.000,00
15	Kursi Rapat	8	3.960.000,00
16	Sofa	1	9.999.999,00
17	Sofa	1	4.000.000,00
18	A.C. Split	1	4.000.000,00
19	Televisi	2	22.644.000,00
20	Loudspeaker	2	7.350.000,00
21	Sound System	1	6.000.000,00
22	Wireless	1	3.500.000,00
23	Pataka	1	1.699.998,00
24	Alat Pemadam/Portable	5	14.199.786,00
25	Portable Ventilator Blower	1	5.549.999,00
26	Microphone/Wireless MIC	2	932.400,00
27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2.331.000,00
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	1.499.610,00
29	Head Set	2	905.760,00
30	Handy Talky (HT)	10	8.500.000,00
31	Drone	1	13.320.000,00
32	Internet	1	32.714.197,50
33	P.C Unit	1	21.960.242,50
34	P.C Unit	1	13.000.000,00
35	Lap Top	4	51.992.400,00
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	7.770.000,00
37	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	14.973.900,00



No	Jenis Barang Yang Dibeli	Jumlah	
		Banyaknya Barang	Harga Perolehan
38	External/ Portable Hardisk	1	1.554.000,00
39	Server	1	27.849.900,00
40	Repeater and Transciever	1	109.871.100,00
41	Tandu	1	15.073.800,00
42	Sling Baja	5	1.250.000,00
43	Sling Baja	4	994.560,00
44	Alat Pendaki/Mountainering	2	800.000,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	181.137.252,00
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	61.998.252,00
46	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	1	119.139.000,00
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6	253.912.500,00
47	Warning System	6	253.912.500,00
	ASET TIDAK BERWUJUD	8	508.138.950,00
48	Kajian NA Perda	1	68.825.550,00
49	Kajian Renkon Cuaca Ekstrim	1	60.001.050,00
50	Kajian Renkon Tsunami	1	59.850.000,00
51	Kajian Renkon Kekeringan	1	60.001.050,00
52	Kajian Renkon Karhutla	1	59.850.000,00
53	Kajian RAD RPB	1	29.997.750,00
54	Kajian Renkon Banjir	1	69.824.550,00
55	Kajian Risiko Bencana	1	99.789.000,00
TOTAL		121	1.533.320.996,00



Dukungan Anggaran

Tabel 1 11. Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			Pendapatan Daerah			
4	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0		
4	1	2	Retribusi Daerah	0		
			Jumlah Pendapatan	0		
5			Belanja Daerah	7.508.076.053	8.709.563.392	1.201.487.339
5	1		Belanja Operasi	6.919.637.053	7.065.007.892	145.370.839
5	1	1	Belanja Pegawai	1.822.533.907	1.839.265.409	16.731.502
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	5.097.103.146	5.225.742.483	128.639.337
5	1	5	Belanja Hibah	-	-	
5	2		Belanja MODAL	578.439.000	1.644.555.500	1.066.116.500
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.829.000	1.014.845.500	626.016.500

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.610.000	119.610.000	0
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000	510.100.000	440.100.000
			Jumlah Belanja	7.508.076.053	8.709.563.392	1.201.487.339
			Total Surplus/(Defisit)			
6			Pembiayaan Daerah			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Tabel 1 12. Dukungan Anggaran Pemenuhan Sasaran Strategis

Sasaran	Program	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)	Ket
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.232.917	4.722.108.846	1.005.875.929	APBD GK
Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Program Penanggulangan Bencana	2.531.779.336	2.788.304.296	256.524.960	APBD GK
Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.260.063.800	1.199.150.250	60.913.550	APBD GK
Jumlah		7.508.076.053	8.709.563.392	1.201.487.339	

Berdasarkan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY Nomor 20/LHP/XVIII.Yog/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari, pada tahun 2025

terdapat *refocusing*, efisiensi anggaran, dan redesign kegiatan. Berikut program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, baik yang mengalami pengurangan maupun penambahan :

Tabel 1 13. Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2025

Program /Kegiatan /SubKegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan Tambah/Kurang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.232.917	4.722.108.846	1.005.875.929	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.970.000	36.810.000	(1.160.000)	
ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.185.000	5.543.100	1.358.100	SPPD dan makmin money
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.822.533.907	1.839.265.409	16.731.502	Penambahan gaji PPPK
ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.560.000	29.760.000	200.000	THR THL
iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.245.000	15.385.800	(15.859.200)	Pengurangan gaji THL yang diterima menjadi CPNS
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.830.000	39.870.000	23.040.000	Pengadaan 2 macam pakaian dinas
ii. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.141.900	97.215.527	4.073.627	
iii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.556.000	25.520.000	(10.036.000)	Pengurangan anggaran diklat
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.810.000	127.691.000	74.881.000	Pembelian Laptop
ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.435.000	8.785.000	2.350.000	
iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.169.900	22.217.300	47.400	FC
iv. Fasilitas Kunjungan Tamu	3.840.000	4.065.000	225.000	makan minum tamu
v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.212.000	27.207.000	(19.005.000)	SPPD Luar daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
i. Pengadaan Mebel	126.718.000 98.781.000	157.508.000 509.706.500	30.790.000 410.925.500	Rak logpal

Program /Kegiatan /SubKegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan Tambah/Kurang
ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.540.000	561.960.000	244.420.000	EWS banjir, genset, alat perlindungan diri
iii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rambu2, jalur evakuasi, repeater
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.078.600	97.278.600	200.000	THR THL
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.700.000	441.950.000	14.250.000	Penambahan unit kendaraan
ii. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	41.300.000	43.800.000	2.500.000	Makan minum pelatihan
iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.475.000	259.519.000	225.044.000	Rehab gudang, rehab parkir
iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	2.700.000	900.000	Penambahan unit AC
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.531.779.336	2.788.304.296	256.524.960	
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	28.750.000	26.230.000	(2.520.000)	Pengurangan SPPD (efisiensi)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
i. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	43.970.000	36.440.000	(7.530.000)	Pengurangan SPPD (efisiensi)
ii. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	177.430.000	166.820.000	(10.610.000)	
iii. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	15.670.000	14.770.000	(900.000)	
iv. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	71.341.700	314.820.000	243.478.300	Penyusunan 4 renkon
v. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	62.055.000	55.335.000	(6.720.000)	Pengurangan SPPD (efisiensi)
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				

Program /Kegiatan /SubKegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan Tambah/Kurang
i. Respon Cepat Darurat Bencan Kabupaten/Kota	1.011.245.000	1.049.475.800	38.230.800	Perlindungan diri dan eskavator move demove
ii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	46.200.000	45.950.000	(250.000)	
iii. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	156.690.000	294.250.000	137.560.000	Logpal bronjong dll
iv. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	230.965.000	225.095.000	(5.870.000)	THL yg diterima jadi PPPK
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
i. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	18.640.000	210.110.000	191.470.000	KRB, RAD, NA Perda PB
ii. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	5.310.000	15.905.000	10.595.000	Monev Kaltana
iii. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	641.612.636	311.203.496	(330.409.140)	Rekonstruksi Tegalrejo
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	691.502.000	799.724.000	108.222.000	
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
i. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.470.000	1.890.000	(580.000)	SPPD
ii. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.105.858.800	982.322.000	(123.536.800)	THL yang diterima jadi PPPK
iii. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	60.844.000	80.784.000	19.940.000	Sertifikasi damkar
iv. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	42.760.000	43.060.000	300.000	
2. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2.710.000	1.560.000	(1.150.000)	SPPD
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
i. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	21.935.500	67.898.750	45.963.250	Sosialisasi dengan Bupati, Wabub dan DPRD
ii. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	21.935.500	20.085.500	(1.850.000)	SPPD

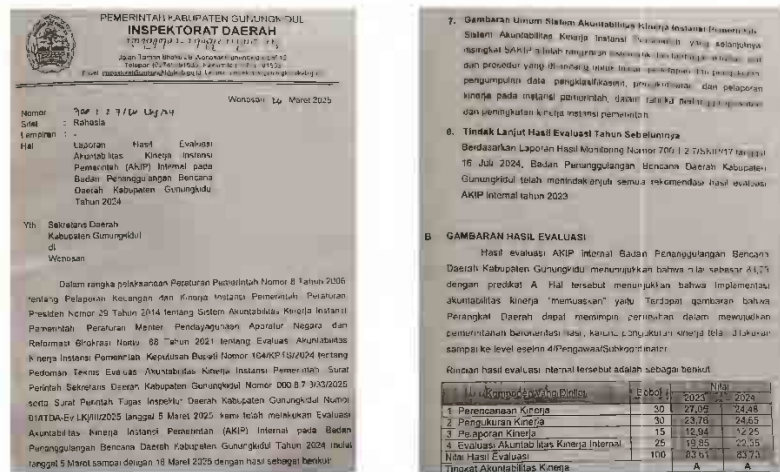
7.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Tabel 1 14. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,48
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,65
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,35
Jumlah		100%	83,73

Gambar 1 13. Nilai AKIP BPBD Tahun 2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen teknis operasional.

1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapny dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel 2 1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah
Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Mewujudkan tata pemerintah yang berkualitas dan dinamis	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
			Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat
	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Derajat kualitas SDM meningkat
			Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun
		Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat
			Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
			Nilai investasi meningkat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk “Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat”.



Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah BPBD selama 5 (lima) tahun anggaran adalah :

“Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana/Kebakaran”

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada BPBD Kabupaten Gunungkidul yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada BPBD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/ kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat	Persentase Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	75	80	85	90	95
2			Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100	100	100	100	100
3			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,5	82	82,5	83	83,5
4	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana.	0	25	50	75	100

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, BPBD Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai BPBD Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.

Target sasaran untuk Tahun 2025 merupakan target tahun kedua dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 memuat sasaran strategis, indikator, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2025	Keterangan Rumus
1	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat	Persentase Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	61,81	(Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan) x 100%
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100	Jumlah kejadian bencana / kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana / kebakaran x 100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	83	Hasil Penilaian AKIP PD
4	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Presentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	75	Jumlah kegiatan keistimewaan yang ditangani dibagi jumlah target kegiatan keistimewaan yang direncanakan x 100%

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana /kebakaran	Sistem penanggulangan bencana yang terencana integratif, dan responsif meningkat	1. Optimalisasi penanganan bencana 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.	1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana 3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 4. Menjalin hubungan kerjasama pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga /organisasi pemerhati bencana. 5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana /kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan Bencana /kebakaran	1. Mengurangi potensi resiko bencana 2. Meningkatkan luas cakupan wilayah manajemen kebakaran 3. Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam penanggulangan bencana
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik PD	Mengembangkan pelayanan prima PD dalam pelayanan publik Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan tata ruang keistimewaan berbasis pengurangan resiko bencana di kawasan SRS (Satuan Ruang Strategis)	Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang di kawasan SRS berbasis pengurangan risiko bencana

Berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2 5. Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1.	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat	Program Penanggulangan Bencana	Presentase desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana terbentuk}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100$
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	15 menit
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rumus : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Topologi data: non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi pemenuhan administrasi perkantoran}}{\sum \text{administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi pemenuhan sarana dan prasarana}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase aparatur sipil taat kode etik	Rumus : $\frac{\sum \text{ASN PD yang taat kode etik}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	Rumus : $\frac{\sum \text{Laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yang disusun}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan	Rumus : $\frac{\sum \text{program dalam Renja PD yang sama dengan RKPD}}{\sum \text{program dalam RKPD}} \times 100$

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			renstra PD terhadap RPJMD	Tipologi data: Non kumulatif
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap program dalam RPJMD	Rumus: $\frac{\sum \text{program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD}}{\sum \text{program dalam RPJMD}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
4	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Presentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	Rumus: $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana}} \times 100$ Tipologi data : Non kumulatif

3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2 6. Struktur Program Dan Kegiatan Yang Terkait Langsung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, responsif meningkat	1. Program Penanggulangan Bencana	2.531.779.336	2.788.304.296	256.524.960
	1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	28.750.000	26.230.000	(2.520.000)
	1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	370.466.700	588.185.000	217.718.300
	1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.445.100.000	1.614.770.800	169.670.800
	1.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	687.462.636	559.118.496	(128.344.140)



Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.260.063.800	1.199.150.250	(60.913.550)
	2.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.213.482.800	1.109.606.000	(103.876.800)
	2.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2.710.000	1.560.000	(1.150.000)
	2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	43.871.000	87.984.250	44.113.250
Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	0	0	0

Tabel 2 7. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung pencapaian sasaran tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.232.917	4.722.108.846	(101.775.606)
	2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.420.000	48.618.100	198.100
	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.883.338.907	1.884.411.209	1.072.302
	2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.527.900	162.605.527	17.077.627
	2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.223.900	196.722.300	58.498.400
	2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.039.000	1.229.174.500	686.135.500

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
	2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.238.210	266.438.210	200.000
	2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.445.000	934.139.000	242.694.000

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2 8. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat.	Persentase penanganan bencana.	Persen	61,81	Triwulan I	15,45
					Triwulan II	15,45
					Triwulan III	15,45
					Triwulan IV	15,46

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2 10. Dukungan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.716.232.917	4.722.108.846	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.531.779.336	2.788.304.296	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	1.260.063.800	1.199.150.250	APBD
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	0	0	Dana Keistimewaan
Jumlah		7.508.076.053	8.709.563.392	APBD

Keterangan Tambahan:

- Indikator kinerja, target kinerja berubah, volume anggaran bertambah 13,79%.
- Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
- Tahun 2025 BPBD tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga

BPBD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 tidak mengelola BTT yang digunakan untuk program penanggulangan kedaruratan bencana hidrometeorologi kekeringan dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran. Walaupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan SK siaga darurat, namun BPBD tidak mengajukan anggaran dari Belanja Tidak Terduga, hal ini dikarenakan dalam penanggulangan bencana atau kebakaran di tahun 2025 menggunakan APBD dan APBD Perubahan.

- Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)

Gambar 2 2. e-gov.gunungkidulkab.go.id



- b. Aplikasi pelaporan realisasi perencanaan

Gambar 2 3. <https://eplan-ng.gunungkidulkab.go.id/>



- c. Aplikasi yang digunakan untuk penganggaran dan perencanaan

Gambar 2 4. <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>



- d. aplikasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa

Gambar 2 5. <https://lpse.gunungkidulkab.go.id/>



- e. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul (SIPAKGK)

Gambar 2 6. <https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id>



- f. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah / Sipanda

Gambar 2 7. <https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/>



- g. Aplikasi Srikandi
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik.

Gambar 2 8. <https://srikandi.arsip.go.id/auth/login>



Masih banyak aplikasi perkantoran yang dipergunakan dalam membantu pencapaian kinerja BPBD, antara lain SIM Persediaan, SIM Aset, APIK, e-Lapor, PPID. Sedangkan aplikasi/instrumen yang khusus digunakan di BPBD Kabupaten Gunungkidul terkait tugas, pokok, dan fungsinya antara lain :

a. Pelaporan SPM

Gambar 2 9. <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home>



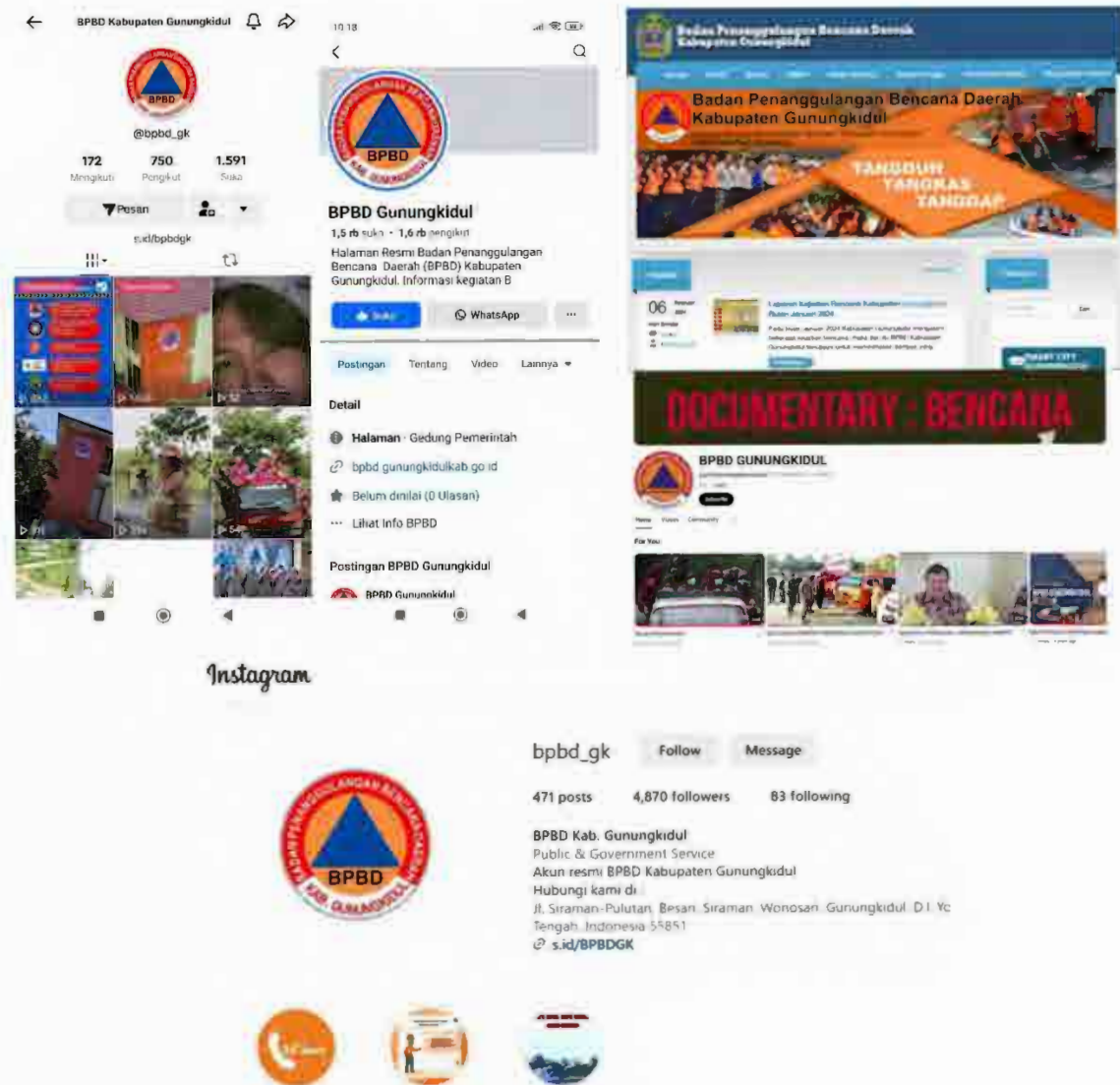
b. Pelaporan Indeks Ketahanan Daerah ke BNPB melalui website <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi#>

Gambar 2 10. <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi#>



c. Media Informasi BPBD

Gambar 2 11. Media Informasi BPBD



d. Dashboard EWS

Untuk menyajikan informasi kritis secara langsung kepada pengambil keputusan. Dengan menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta, dashboard mempermudah interpretasi data dan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat merespons situasi yang berkembang.

Gambar 2 12. Dashboard EWS



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

BPBD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3 1. Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam rangka pencapaian Tujuan Utama, BPBD telah menetapkan Indikator Tujuan Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3 2. Capaian Indikator Kinerja Utama/IKU

No	IKU	Indikator Kinerja Utama/IKU	Tahun 2024		Tahun 2025		Target Akhir Renstra (2026)
			Target IKU	Realisasi IKU	Target IKU	Realisasi IKU	
1	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	<u>Indikator</u> Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat <u>Meta indikator :</u> Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan x 100%	58,33	61,11	61,81	62,50	65,28
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	<u>Indikator</u> Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani <u>Meta indikator :</u> Jumlah kejadian bencana / kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana / kebakaran x 100%	100	100	100	100	100

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta indikator	Satuan	Capaian Kinerja				Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
				Base line (2021)	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode	
1	Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	<u>Indikator</u> : Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat <u>Meta indikator</u> : Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan x 100%	%		56,94	60,41	61,11	61,81	62,50	101,11 %	Sangat Tinggi	65,28
2	Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	<u>Indikator</u> : Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani <u>Meta indikator</u> : Jumlah kejadian bencana / kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana / kebakaran x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	%	82,25	82,35	83,61	83,73	83	83,73	100,87	Sangat Tinggi	83,5
4	Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana	<u>Indikator</u> : Presentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana <u>Meta indikator</u> : Jumlah realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang dibagi jumlah target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana	%	NA	0	25	0	75	0	0	Sangat rendah	100

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1

Sasaran Strategis : Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, dan Responsif Meningkat

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana, yang mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini
2. Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat terjadi bencana, mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat.
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana, mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.



Bencana adalah urusan semua pihak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai kegiatan melalui program kegiatan yang telah direncanakan. Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Guna mencapainya pada tahun anggaran 2025 menargetkan 2 kalurahan terbentuk menjadi kalurahan tangguh bencana. Pembentukan Kaltana pada tahun anggaran 2025 di Kalurahan Jetis (Saptosari) dan Kalurahan Grogol (Paliyan).

$$\begin{aligned} \text{Presentase desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana} &= \frac{\text{Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk}}{\text{Jumlah kalurahan}} \times 100 \\ &= \frac{90 \text{ kalurahan}}{144 \text{ kalurahan}} \times 100 \\ &= 62,50 \end{aligned}$$

Tabel 3 4. Capaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, Dan Responsif Meningkatkan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	61,51	62,50	101,11	Sangat tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 101,11%. Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan realisasi 62,50 melebihi dari yang target yang ditetapkan sebesar 61,51.

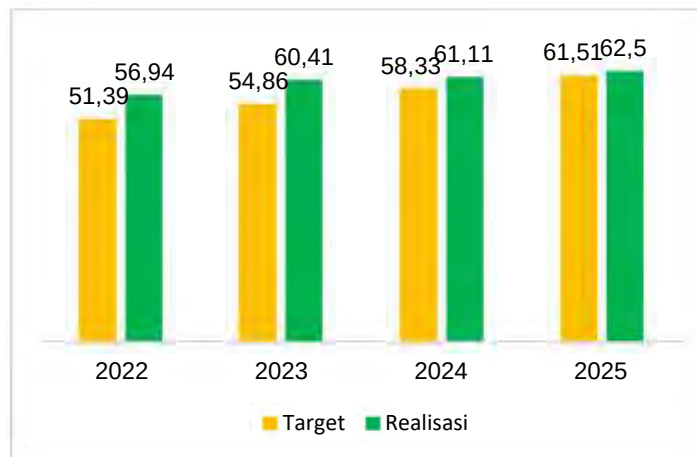
Realisasi kinerja 62,50 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 Serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

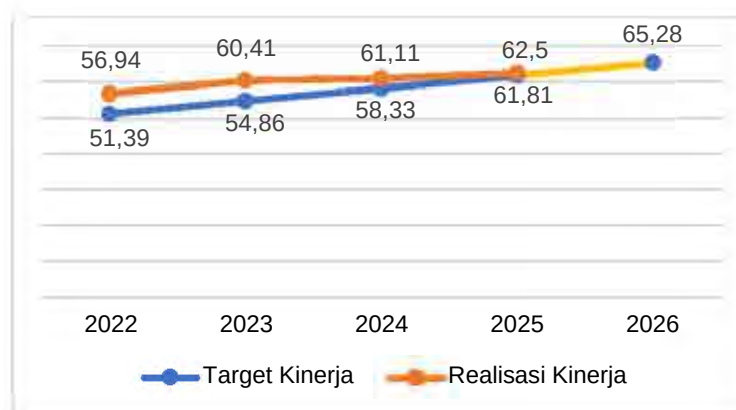
No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
1	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	56,94	60,41	61,11	62,50	65,28	95,74

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 61,11 meningkat menjadi 62,50 pada tahun 2025.

Gambar 3 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024



Gambar 3 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 dan Target Renstra



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul meningkat.

1. Program Kegiatan Guna Pencapaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, Dan Responsif Meningkat



Tahap Pra Bencana

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di



kawasan tempat tinggalnya. Selain melakukan sosialisasi bencana, BPBD juga melakukan sosialisasi bencana kebakaran yang dilakukan UPT Pemadam Kebakaran.

Tabel 3 6. Rekapitulasi penerima layanan sosialisasi KIE

No	Media Sosialisasi	Penerima Informasi
1	Sosialisasi PRB (Jumlah warga Kalurahan Pucanganom, Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, sumber data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester I tahun 2025)	3.931 orang
2	Sosialisasi bencana Kebakaran di 9 Kalurahan a. Pacarjo, Semanu b. Bejiharjo, Karangmojo c. Bunder, Patuk d. Getas, Playen e. Tegalrejo, Gedangsari f. Kedungkeris, Nglipar g. Giring, Paliyan h. Jetis, Saptosari i. Baleharjo, Wonosari.	70.835 (Sumber data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester I tahun 2025)
2	Apel Siaga Bencana	600 orang
3	Media Sosial :	
	a. Facebook	1.700 orang
	b. Instagram	8.975 orang
	c. Tiktok	3.232 orang
	d. Youtube	100 orang
4	Website	
	Jumlah	89.373 orang

Gambar 3 3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Tahun 2025



2) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi

Pada tahun 2025, BPBD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemasangan rambu kebencanaan sebanyak 86 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 7. Pemasangan Rambu Kebencanaan

Rambu Peringatan Bencana	Target	Realisasi
Penyediaan Rambu sarpas Pendukung EWS	50	50
KALTANA	20	20
SPAB	6	6
Gladi Kesiapsiagaan	10	10
Jumlah	86	86

Gambar 3 4. Rambu evakuasi



b. Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- Gladi Kesiapsiagaan Bencana (Kanigoro, Saptosari)
- Pelatihan Relawan (Jurangjero, Ngawen dan Pacarejo, Semanu)
- Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (kalurahan sodo)
- Pembentukan SPAB (SD Wiloso)

c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan KALTANA

Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak tahun anggaran 2012. Sampai dengan tahun 2025, Kaltana yang terbentuk berjumlah 90 Kalurahan, dari 144 Kalurahan. Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dilaksanakan di Kalurahan Jetis (Saptosari) dan Kalurahan Grogol (Paliyan).

Gambar 3 5. Pelaksanaan Pembentukan Kaltana di Kalurahan Jetis



Tabel 3 8. Daftar Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Gunungkidul

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Semoyo	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.378	1.379	2.757
2	Terbah	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.291	1.321	2.612
3	Nglegi	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.578	1.648	3.226
4	Hargomulyo	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	3.664	3.676	7.340
5	Mertelu	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.895	1.890	3.785
6	Candirejo	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor	3.871	3.853	7.724
7	Karangsari	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.938	2.975	5.913
8	Ngalang	Gedangsari	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor	4.236	4.358	8.594
9	Pengkol	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.843	2.827	5.670
10	Natah	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.935	1.976	3.911
11	Jurangjero	Ngawen	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.357	2.370	4.727
12	Pacarejo	Semanu	2014	BPBD Gunungkidul	Rawan Angin dan banjir	8.515	8.788	17.303
13	Giritirto	Purwosari	2014	BPBD DIY	Rawan longsor kategori rendah	2.028	2.130	4.158
14	Watugajah	Gedangsari	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.037	2.023	4.060
15	Kedungpoh	Nglipar	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor	3.096	3.157	6.253
16	Sawahan	Ponjong	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.838	2.880	5.718
17	Tambakromo	Ponjong	2015	BNPB	Rawan Longsor	2.066	2.203	4.269
18	Semin	Semin	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor	5.725	5.790	11.515
19	Rejosari	Semin	2015	BNPB	Rawan Longsor	2.719	2.741	5.460
20	Girijati	Purwosari	2015	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.066	1.077	2.143
21	Kemadang	Tanjunsari	2015	BNPB	Rawan Tsunami	3.583	3.655	7.238
22	Giricahyo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	2.091	2.170	4.261
23	Sambirejo	Ngawen	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor	3.903	3.814	7.717
24	Umbulrejo	Ponjong	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor	3.727	3.747	7.474
25	Putat	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.142	2.154	4.296
26	Patuk	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.447	1.453	2.900
27	Giripurwo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor Kategori Rendah	4.440	4.709	9.149

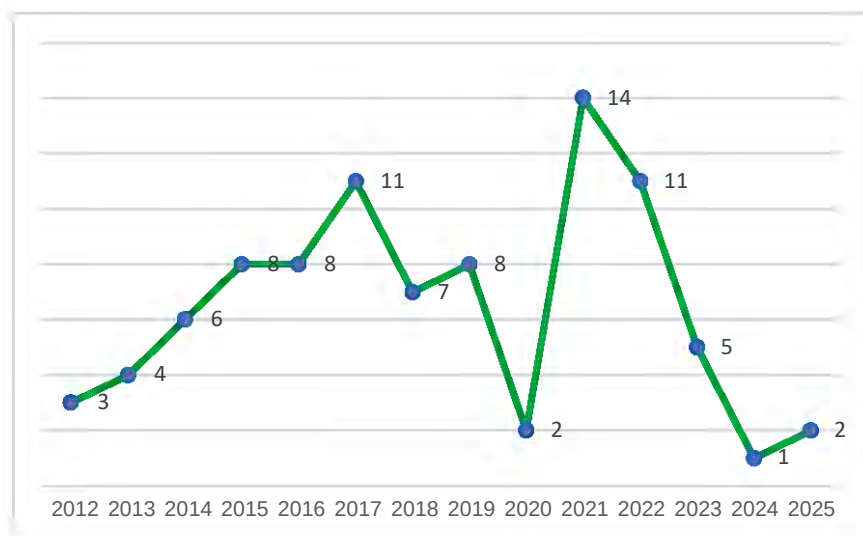
No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
28	Katongan	Nglipar	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah	2.495	2.541	5.036
29	Kepek	Wonosari	2016	BPBD DIY	Rawan Banjir	6.027	6.004	12.031
30	Sampang	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.500	1.501	3.001
31	Tegalrejo	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	4.001	3.830	7.831
32	Kampung	Ngawen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	3.372	3.391	6.763
33	Girisuko	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.728	2.864	5.592
34	Banyusoca	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.940	2.970	5.910
35	Getas	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.757	2.785	5.542
36	Kanigoro	Saptosari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami	3.406	3.544	6.950
37	Girikarto	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami	1.963	2.090	4.053
38	Banjarejo	Tanjungsari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami	2.927	3.083	6.010
39	Sidoharjo	Tepus	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami	1.762	316	2.078
40	Giriasih	Purwosari	2017	BPBD Gunungkidul	Rawan longsor kategori rendah	749	789	1.538
41	Jatiayu	Karangmojo	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	3.794	3.862	7.656
42	Beji	Patuk	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor	1.311	1.374	2.685
43	Kenteng	Ponjong	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir	1.620	1.713	3.333
44	Girimulyo	Panggang	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah	2.918	2.971	5.889
45	Tepus	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami	2.428	426	2.854
46	Balong	Girisubo	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami	1.937	2.026	3.963
47	Purwodadi	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami	2.439	315	2.754
48	Serut	Gedangsari	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	2.504	2.578	5.082
49	Beji	Ngawen	2019	BPBD DIY	Rawan Longsor	2.131	2.137	4.268
50	Karangawen	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Longsor kategori rendah dan Gempa	793	827	1.620
51	Siraman	Wonosari	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir	3.071	3.080	6.151
52	Bejiharjo	Karangmojo	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir	8.157	8.273	16.430
53	Songbanyu	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Tsunami	1.752	1.791	3.543
54	Jepitu	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Tsunami	2.128	2.190	4.318
55	Watusigar	Ngawen	2019	BPBD DIY	Rawan Banjir	2.768	2.809	5.577



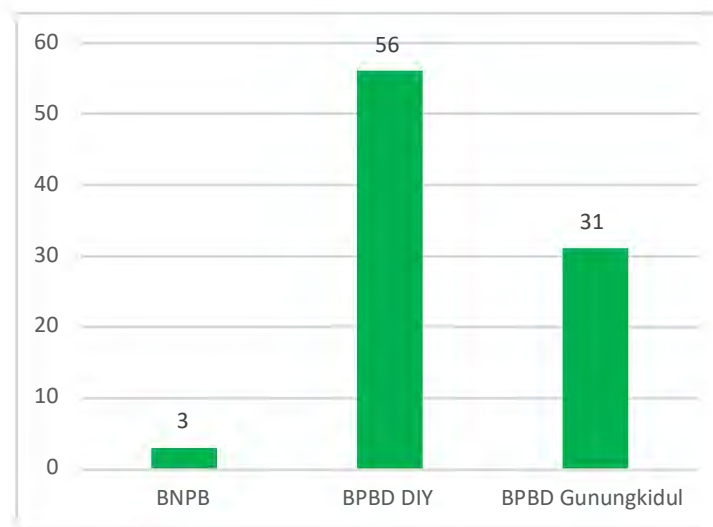
No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
56	Giriharjo	Panggang	2020	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	2.011	2.030	4.041
57	Plembutan	Playen	2020	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir	2.414	2.488	4.902
58	Salam	Patuk	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Longsor	1.572	1.641	3.213
59	Sumberwungu	Tepus	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	3.147	3.301	6.448
60	Pundungsari	Semin	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	2.381	2.331	4.712
61	Kalitekuk	Semin	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir Potensi Longsor	1.988	2.012	4.000
62	Nglanggeran	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.337	1.351	2.688
63	Ngoro-oro	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.789	1.887	3.676
64	Bunder	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.761	1.760	3.521
65	Tancep	Ngawen	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	2.984	3.082	6.066
66	Pilangrejo	Nglipar	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor	1.788	1.879	3.667
67	Ngestirejo	Tanjungsari	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Tsunami	2.877	2.984	5.861
68	Nglipar	Nglipar	2021	BPBD DIY	Angin Kencang	2.259	2.207	4.466
69	Krambilsawit	Saptosari	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Tsunami	3.268	3.250	6.518
70	Giriwungu	Pangang	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa	1.225	1.319	2.544
71	Pucung	Girisubo	2021	BPBD DIY	Rawan Banjir	1.624	1.650	3.274
72	Candirejo	Semanu	2022	BPBD Gunungkidul	Longsor	4.071	3.992	8.063
73	Bleberan	Playen	2022	BPBD DIY	Gempa	2.730	2.694	5.424
74	Pringombo	Rongkop	2022	BPBD DIY	Banjir	1.988	1.964	3.952
75	Gari	Wonosari	2022	BPBD DIY	Angin Kencang	3.205	3.211	6.416
76	Kemiri	Tanjungsari	2022	BPBD DIY	Angin Kencang	2.354	2.318	4.672
77	Kedungkeris	Nglipar	2022	BPBD DIY	Gempa Potensi Tsunami	2.243	2.357	4.600
78	Pengkok	Patuk	2022	BPBD Gunungkidul	Angin Kencang	4.055	4.125	8.180
79	Karangasem	Paliyan	2022	BPBD Gunungkidul	Longsor	1.588	1.583	3.171
80	Mulusan	Paliyan	2022	BPBD DIY	Angin Kencang	2.680	2.590	5.270
81	Mulo	Wonosari	2022	BPBD DIY	Angin Kencang	2.445	2.364	4.809
82	Gading	Playen	2022	BPBD DIY	Banjir	3.043	3.031	6.074

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
83	Botodayaan	Rongkop	2023	BPBD Gunungkidul	Banjir Genangan	2.577	2.645	5.222
84	Semugih	Rongkop	2023	BPBD Gunungkidul	Banjir Genangan	2.561	2.580	5.141
85	Hargosari	Tanjungsari	2023	BPBD Gunungkidul	Gempa Potensi Tsunami	2.941	2.983	5.924
86	Semanu	Semanu	2023	BPBD DIY	Angin Kencang	7.526	7.638	15.164
87	Giripanggung	Semanu	2023	BPBD DIY	Angin Kencang	3.298	3.404	6.702
88	Sidorejo	Ponjong	2024	BPBD Gunungkidul	Angin Kencang	4.815	4.846	9.661
89	Jetis	Saptosari	2025	BPBD Gunungkidul	Angin Kencang	2.708	2.716	5.424
90	Grogol	Paliyan	2025	BPBD Gunungkidul	Angin Kencang	1.176	1.259	2.435
Jumlah penduduk di Kalurahan Tangguh Bencana s/d 2025						243.401	241.470	484.871

Gambar 3 6. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana



Gambar 3 7. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana



SPAB

SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang aman bencana. Penyelenggaraan SPAB berdasarkan pada Permendikbud RI No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persejen Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program SPAB. SPAB memiliki beberapa ruang lingkup antara lain penyelenggaraan SPAB pra-bencana, penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan layanan pendidikan pasca bencana. Pilar SPAB antara lain fasilitas sekolah aman bencana, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 296/KPTS/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB sebagai upaya mengantisipasi risiko bencana pada siswa. Sekretariat Bersama ini berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Beberapa tugas Sekretariat Bersama SPAB antara lain :



1. Melakukan pemetaan program SPAB yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB
3. Melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB
4. Melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 3 9. Satuan Pendidikan pada Kabupaten Gunungkidul

No	Satuan Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Kementerian Agama		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK/RA	18	552	570		98	98
2	SD/MI	405	61	466	12	71	83
3	SMP/MTs	61	49	110	9	22	31
4	SMA/MA	11	13	24	1	11	12
5	SMK	13	32	45			
Total		508	707	1.215	22	202	224

Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2024

Tabel 3 10. Daftar SPAB di Kabupaten Gunungkidul

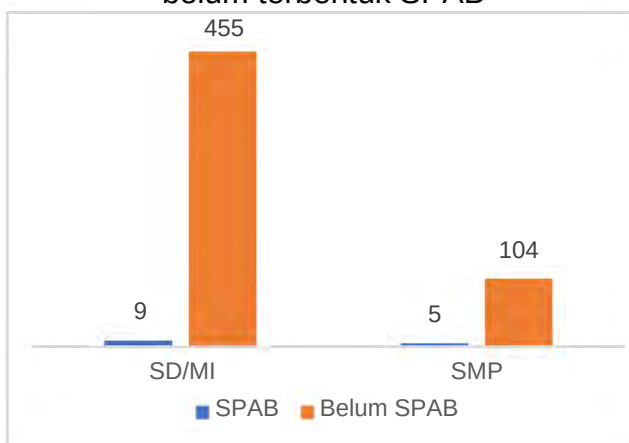
No	Nama Sekolah	Tahun Pelaksanaan	Fasilitator
1	SMP 3 Ponjong	2014	BPBD GK
2	SMK N 1 Ngawen	2014	BPBD DIY
3	SMP 3 Nglipar	2015	BPBD DIY
4	SMA 1 Patuk	2018	BPBD DIY
5	SMK Kelautan, Tanjungsari	2018	BPBD DIY
6	SMK 1 Purwosari	2018	BPBD DIY
7	SMKN Gedangsari	2018	BPBD DIY
8	MAN 1 Wonosari	2019	BPBD DIY
9	SMK 1 Girisubo	2019	BPBD DIY
10	SMK Rongkop	2019	BPBD DIY
11	SMK Gedangsari	2019	BPBD DIY
12	SMK N 1 Tepus	2019	BPBD DIY
13	SLB N 1 Gunungkidul	2022	BPBD DIY
14	SLB N 2 Gunungkidul	2022	BPBD DIY
15	SD Buyutan, Gedangsari		BPBD DIY
16	SMK IKIP Veteran III, Ponjong	2022	BPBD DIY
17	SMK MUH. Tepus	2022	BPBD DIY
18	SMK MUH. 1 Patuk	2022	BPBD DY
19	SMK SANJAYA Ngawen	2022	BPBD DIY
20	SMK NEGERI 1 Semin	2022	BPBD DIY
21	MA YAPPI Gubugrubuh Playen	2022	BPBD DIY
22	SMA N 1 Panggang	2022	BPBD DIY
23	SMK N 1 Saptosari	2022	BPBD DIY
24	PONPES Darul Qur'an	2022	BPBD DIY
25	SLB Sekar Handayani, Semanu	2022	DISDIKPORA DIY
26	SLB Krida Mulia III	2022	DISDIKPORA DIY
27	SLB Sutawijaya, Ngawen	2022	DISDIKPORA DIY
28	SMA N 1 Karangmojo	2022	DISDIKPORA DIY



No	Nama Sekolah	Tahun Pelaksanaan	Fasiitator
29	SMA N 1 Playen	2022	DISDIKPORA DIY
30	SMA N 1 Playen	2022	DISDIKPORA DIY
31	SMA Dominikus Wonosari	2022	DISDIKPORA DIY
32	SMK MUH. 1 Playen	2022	DISDIKPORA DIY
33	SMK Muhammadiyah Ngawen	2022	DISDIKPORA DIY
34	SD N Tepus	2022	YAYASAN BINTARI
35	SD Songbanyu, Girisubo	2022	YAYASAN BINTARI
36	SD 2 Bendung, Semin	2022	BPBD GK
37	SD N Patuk 1	2022	BPBD GK
38	SMP Muh. Pilangrejo, Nglipar	2022	BPBD GK
39	SD Genjahan, Ponjong	2023	BPBD GK
40	SD N 1 Wonosari	2023	BPBD GK
41	SD N 2 Kemiri	2023	BPBD GK Melalui DAIS
42	SMP N 1 Gedangsari	2023	BPBD GK Melalui DAIS
43	SMP N 1 Paliyan	2024	BPBD GK
44	SD Wiloso	2025	BPBD GK

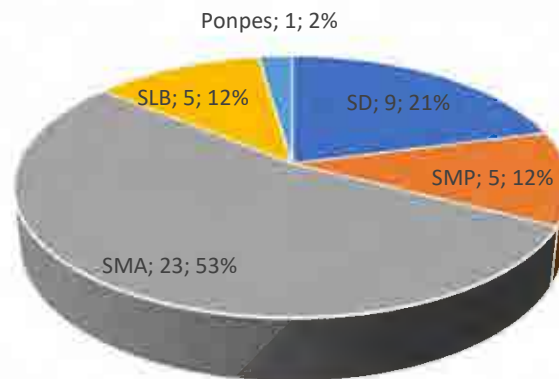
Satuan Pendidikan memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan pendidikan yang aman terhadap bencana bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan kewenangannya melaksanakan SPAB untuk satuan pendidikan dasar, yaitu sejumlah 576 satuan pendidikan yang terdiri dari 466 SD dan 110 SMP.

Gambar 3 8. Perbandingan Jumlah SD dan SMP yang sudah terbentuk SPAB dan yang belum terbentuk SPAB



Berdasarkan gambar disamping terlihat bahwa baru sebagian kecil satuan pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul yang berstatus SPAB. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, agar satuan pendidikan melaksanakan SPAB.

Gambar 3 9. Pembentukan SPAB Berdasarkan Satuan Pendidikan



d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) / Petugas Penanggulangan Bencana

BPBD Kabupaten Gunungkidul memiliki Petugas Penanggulangan Bencana/Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 24 orang, dengan ketugasan :

- Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dengan mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan analisis kebutuhan sosial dan perlindungan sosial.
- Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana
- Mengaktifkan posko penanggulangan bencana
- Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor terkait dalam penanganan bencana

Gambar 3 10. Kegiatan Tim Reaksi Cepat



e. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel, masyarakat, dan kesiapsiagaan peralatan penanggulangan bencana, serta untuk meminimalisir dampak bencana baik kerusakan sarana prasarana maupun korban jiwa.

Tabel 3 11. Gladi Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2025

No	Kalurahan	Kapanewon	Fasilitas
1	Kanigoro	Saptosari	BPBD GK

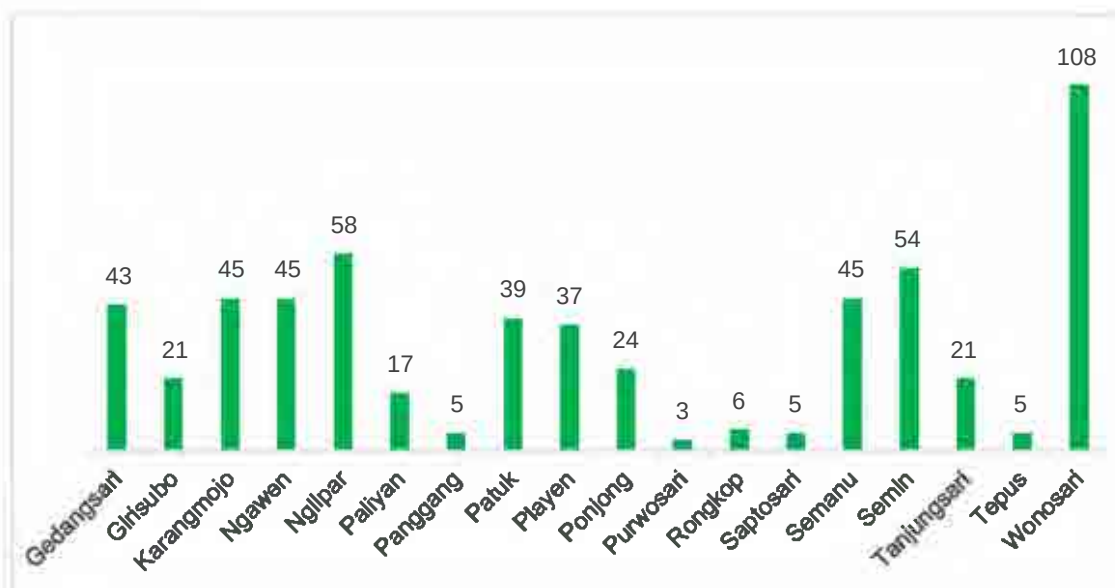
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, BPBD Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan mitigasi bencana. Antara lain pruning pohon, pembersihan luweng, pengecekan sumber air, dan lain-lain.



Tahap Tanggap Darurat

Sepanjang Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul mencatat sebanyak **581 kejadian** bencana yang tersebar di berbagai wilayah. Dari keseluruhan kejadian tersebut, tercatat **996 jiwa** terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat peristiwa bencana yang terjadi. Tahun 2025, Kabupaten Gunungkidul juga menetapkan status siaga darurat bencana sebanyak 1 dokumen yaitu Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 315/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah.

Gambar 3 11. Rekapitulasi data kejadian bencana Tahun 2025 Per Kapanewon



Tabel 3 12. Data Kejadian Bencana Tahun 2025

No.	Kapanewon	JENIS BENCANA												
		Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang dan abrasi	Cuaca Esktrim	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Gempa Bumi	Tsunami	Erupsi Gunung Api	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kebakaran Gedung dan Pemukiman	Gagal Teknologi	Konflik Sosial
1	Gedangsari		24		9							10		
2	Girisubo				21									
3	Karangmojo		2		34							9		
4	Ngawen		19		21							5		
5	Nglipar		11		44							3		
6	Paliyan	4			10		1					2		
7	Panggang		4		1									
8	Patuk		18		19							2		
9	Playen	3	5		20							9		
10	Ponjong		11		12							1		
11	Purwosari		1		2									
12	Rongkop		3		2							1		
13	Saptosari		3		2									
14	Semanu	3	1		31							10		
15	Semin		12		37							5		
16	Tanjungsari	4	3		12							2		
17	Tepus	1			2		1					2		
18	Wonosari	5	2		88							12		
Jumlah		20	119	0	367	0	2	0	0	0	0	73	0	0
TOTAL KEJADIAN		581 Kejadian												

Tabel 3 13. Data Korban Bencana Tahun 2025

No.	Kapanewon	Jumlah dan Kondisi Korban		
		MD	Luka	Mengungsi
1	Gedangsari		1	2
2	Girisubo			
3	Karangmojo			
4	Ngawen			
5	Nglipar			
6	Paliyan			
7	Panggung			
8	Patuk			
9	Playen			1
10	Ponjong			
11	Purwosari			
12	Rongkop			4
13	Saptosari			
14	Semanu			
15	Semin			
16	Tanjungsari		1	
17	Tepus			
18	Wonosari		1	1
Jumlah		0	3	8

Korban Terdampak	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Anak-anak	56	58
Dewasa	502	235
Lansia	90	90
Disabilitas	0	0
ODGJ	0	0
Ibu Hamil	0	0
Jumlah	648	383

Korban Terdampak (Kekeringan)	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Anak-anak	487	504
Dewasa	4363	2042
Lansia	782	782
Disabilitas	0	0
ODGJ	0	0
Ibu Hamil	0	0
Jumlah	5632	3328

Tabel 3 14. Data Korban Bencana Tahun 2025 Per Jenis Bencana

No.	Jenis Bencana	Jumlah Korban (Jiwa)
1	Banjir	129
2	Tanah Longsor	155
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	0
4	Cuaca Ekstrem	543
5	Kekeringan	8.960
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	0
7	Gempa Bumi	0
8	Tsunami	0
9	Erupsi Gunung Api	0
10	Epidemi dan Wabah Penyakit	0
11	Kebakaran Gedung dan Pemukiman	169
12	Gagal Teknologi	0
13	Konflik Sosial	0
Jumlah		9.956

Tabel 3 15. Data Kerugian Bencana Tahun 2025 Per Jenis Bencana

No.	Jenis Bencana	Kerugian (Rp.)
1	Banjir	Rp 73.500.000
2	Tanah Longsor	Rp 722.000.000
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	Rp -
4	Cuaca Ekstrem	Rp 822.810.000
5	Kekeringan	Rp 1.344.000.000
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 200.000
7	Gempa Bumi	Rp -
8	Tsunami	Rp -
9	Erupsi Gunung Api	Rp -
10	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rp -
11	Kebakaran Gedung dan Pemukiman	Rp 3.447.050.000
12	Gagal Teknologi	Rp -
13	Konflik Sosial	Rp -
Jumlah		Rp 6.409.560.000

Gambar 3 12. Foto dokumentasi bencana



Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, BPBD Kabupaten Gunungkidul mengirimkan bantuan logistik permakanan dan peralatan.

Gambar 3 13. Foto dokumentasi dropping logistik



Pada tahun 2025 musim kemarau terjadi kemarau basah, sehingga Kabupaten Gunungkidul tidak mengalami bencana kekeringan ekstrim, hanya beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.

Tabel 3 16. Rekap Data Potensi Kekeringan Periode Januari S.D Desember 2025

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Gedangsari	1	1	-	-	-
2	Girisubo	3	24	79	773	2.612
3	Karangmojo	2	7	17	349	1.298
4	Ngawen	-	-	-	-	-
5	Nglipar	6	28	-	2.914	6.082
6	Paliyan	3	15	-	868	-
7	Panggang	6	20	72	3.388	13.624
8	Patuk	2	3	-	169	592
9	Playen	-	-	-	-	-
10	Ponjong	4	11	19	534	1.808
11	Purwosari	2	15	122	2.977	11.897
12	Rongkop	3	19	-	345	996
13	Saptosari	7	17	36	1.054	2.970
14	Semanu	-	-	-	-	-
15	Semin	1	1	-	96	268
16	Tanjungsari	4	36	111	429	883

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
17	Tepus	5	58	135	7.353	24.913
18	Wonosari	-	-	-	-	-
	TOTAL	49	255	591	21.249	67.943
	Potensi Terdampak [memberikan data]	49	255	591	21.249	67.943
	Terdampak [Mengajukan dropping]	12	16	67		8.960

Tahun Anggaran 2025, BPBD Kabupaten Gunungkidul melalui APBD Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan belanja air sebanyak 1.500 tangki dan dikurangi melalui APBD Perubahan sehingga tersedia 880 tangki, terealisasi 224 tangki.

Tabel 3 17. Realisasi Dropping Air Tahun 2025

Kapanewon, Kalurahan	Jumlah Rit dalam tangki
Nglipar	8
Kedungpoh	8
Paliyan	8
Karangduwet	8
Rongkop	92
Semugih	60
Melikan	24
Bohol	8
Saptosari	4
Monggol	4
Tepus	60
Giripanggung	60
Gedangsari	8
Mertelu	8
Ngawen	12
Jurangjero	12
Patuk	20
Terbah	4
Nglanggeran	16
Semin	12
Rejosari	12
Grand Total	224



Tahap Pasca Bencana

Kegiatan penanganan pasca bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pada tahun anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran untuk pasca bencana melalui sub kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota sebesar Rp 311.203.496,-.

Tabel 3 18. Realisasi Anggaran Penanganan Pasca Bencana

No.	Jenis Kejadian	Alamat	Nama Penerima Bantuan	Anggaran
A. Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Infrastruktur				
1	Fasum Talud Longsor	Karangwetan, Gedangrejo, Karangmojo	Pemkal Gedangrejo	12.224.000
2	Fasum Talud Longsor	Wonosari, Jurangjero, Ngawen	Pemkal Jurangjero	11.898.000
3	Fasum Jembatan terdampak banjir	Wiyoko Utara RT 030/RW 008, Plembutan, Playen	Pemkal Plembutan	11.712.000
4	Fasum Drainase Longsor	Kayoman RT 08/RW 02, Serut, Gedangsari	Pemkal Serut	10.448.000
5	Fasum Talud Longsor	Wonosari RT 005/RW 007, Jurangjero, Ngawen	Pemkal Jurangjero	12.176.000
Jumlah				58.458.000
B. Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Untuk Keluarga				
1	Rumah terdampak tanah longsor	Bantengwareng RT 04/RW 01, Tancep, Ngawen	Sarjono	3.370.000
2	Rumah terdampak tanah longsor	Sawur RT 006/RW 001, Sawahan, Ponjong	Satin	8.798.000
3	Rumah terdampak kebakaran	Bungmanis, Pucanganom, Rongkop	Parwanto	13.647.000
4	Rumah terdampak tanah longsor	Gambarsari RT 01/RW 07, Jurangjero, Ngawen	Sarni	6.990.000
5	Rumah terdampak kebakaran	Ngelo RT 06/RW 01, Candirejo, Semin	Tugino	13.999.000
6	Rumah terdampak kebakaran	Putat Wetan RT 28/RW 07, Putat, Patuk	Rahmad Nurjaya	9.543.000
7	Rumah terdampak kebakaran	Brongkol RT 002/RW 008, Purwodadi, Tepus	Kiswanto	7.982.500
8	Rumah terdampak tanah ambles	Tlogowareng RT 002/RW 010, Karangmojo, Karangmojo	Maryadi	10.360.000
9	Rumah terdampak cuaca ekstrem	Tengger RT 003/RW 003, Sawahan, Ponjong	Marsidi	16.606.000
10	Rumah terdampak talud longsor	Wonosari RT 005/RW 007, Jurangjero, Ngawen	Yohanes Sumadi	8.448.000
11	Rumah terdampak cuaca ekstrem	Blembem RT 014/RW 008, Candirejo, Semin	Suparlan	14.216.000

No.	Jenis Kejadian	Alamat	Nama Penerima Bantuan	Anggaran
12	Rumah terdampak cuaca ekstrem	Bendungan RT 03/RW 08, Sumberejo, Semin	Sumardi Wibisono	16.172.000
13	Rumah terdampak cuaca ekstrem	Padem RT 004/RW 001, Girikarto, Panggang	Supartono	6.128.000
Jumlah				136.259.500
JUMLAH REALISASI BELANJA STIMULAN				194.717.500

Gambar 3 14. Stimulan Pasca Bencana



Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan. Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.

Pembentukan FPRB tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 291/KPTS/2024 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul.

Tugas FPRB antara lain:

- 1) Mendorong terwujudnya lingkungan yang mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan melalui penumbuhan kesadaran dalam pengurangan risiko bencana



- 2) Mengoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan oleh masyarakat dan komunitas di daerah
- 3) Mendorong kerjasama efektif antar berbagai pihak dan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul
- 4) Memfasilitasi usaha integrasi dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah

Gambar 3 15. Forum FPRB



Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sistem dasar penanggulangan bencana antara lain :

- 1) Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi IKU nya Bupati Gunungkidul
- 2) Rapat Koordinasi FPRB Kabupaten Gunungkidul
- 3) Monitoring dan evaluasi Kalurahan Tangguh Bencana
- 4) Kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati bulan bencana pada bulan Oktober
- 5) Pembinaan dan pengawasan Kalurahan Tangguh Bencana yang sudah terbentuk



Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana

Guna memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dilakukan monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2025, dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk keseluruhan Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut perlu dilakukan tindak lanjut, seperti pembinaan dan monev yang berkelanjutan.

Tabel 3 19. Daftar Kaltana yang Memiliki Dokumen dan Sarpras PB Lengkap

No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	SK FPRB	SK Tim PB	RPB	Ren kon	Titik Kumpul	Jalur Evakuasi
1	Pacarejo	Semanu	2014	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Pengkol	Nglipar	2014	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kedungpoh	Nglipar	2015	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kemadang	Tanjungsari	2015	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Umbulrejo	Ponjong	2016	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Girisuko	Panggang	2017	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Girikarto	Panggang	2017	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Balong	Girisubo	2018	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Songbanyu	Girisubo	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Jepitu	Girisubo	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Karangawen	Girisubo	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Watusigar	Ngawen	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Bejiharjo	Karangmojo	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Beji	Ngawen	2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Giriharjo	Panggang	2020	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Ngestirejo	Tanjungsari	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Salam	Patuk	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
18	Sumberwungu	Tepus	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Kalitekuk	Semin	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Nglipar	Nglipar	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Krambilsawit	Saptosari	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
22	Bunder	Patuk	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Ngoro-oro	Patuk	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Giriwungu	Panggang	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
25	Pucung	Girisubo	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
26	Tancep	Ngawen	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
27	Pilangrejo	Nglipar	2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
28	Candirejo	Semanu	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
29	Bleberan	Playen	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
30	Pringombo	Rongkop	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
31	Gari	Wonosari	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
32	Kemiri	Tanjungsari	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
33	Kedungkeris	Nglipar	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
34	Karangasem	Paliyan	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
35	Mulusan	Paliyan	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
36	Mulo	Wonosari	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
37	Gading	Playen	2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
38	Giripanggung	Tepus	2023	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
39	Semanu	Semanu	2023	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
40	Botodayaan	Rongkop	2023	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
41	Semugih	Rongkop	2023	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
42	Hargosari	Tanjungsari	2023	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3 20. Daftar Kaltana yang Tidak Memiliki Dokumen dan Sarpras PB

No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	SK FPRB	SK Tim PB	RPB	Ren kon	Titik Kumpul	Jalur Evakuasi
1	Mertelu	Gedangsari	2013	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk
2	Natah	Nglipar	2014	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk
3	Katongan	Nglipar	2016	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk
4	Sambirejo	Ngaweni	2016	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk
5	Tegalrejo	Gedangsari	2017	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk	Tdk

Gambar 3 16. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kaltana Tahun 2025



Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat

Permasalahan

- 1) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas.
- 2) Regulasi/kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya tersedia, dan perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada sehingga sesuai dengan peraturan di atasnya.

- 3) Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain *early warning system* untuk ancaman bencana gempa bumi, tanah longsor.
- 4) Pengelolaan database kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.
- 5) Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal.
- 6) Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana. Ditambah dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- 7) Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil BPBD.
- 8) Rencana kontijensi belum semua disusun untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul
- 9) Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan perangkat daerah/instansi lain.

Solusi :

- a. Perlu segera dilakukan reviu terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sehingga sesuai dengan peraturan diatasnya, dan perlu segera disusun regulasi terkait kajian resiko bencana dan dokumen kajian lainnya dan dapat disosialisasikan kepada stakeholder.
- b. Pengadaan sarana prasarana peringatan dini dan sarana prasarana lainnya
- c. Perlu pengembangan dan penambahan feature sistem informasi/aplikasi pengelolaan database bencana dan penyaluran logistik kepada masyarakat
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana penanggulangan bencana seperti pembentukan kalurahan tangguh bencana,

satuan pendidikan aman bencana, pembentukan relawan tangguh bencana di setiap kalurahan

- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas personel BPBD
- f. Penyusunan rencana kontijensi untuk setiap jenis bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.
- g. Peningkatan mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.
- h. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

2

Sasaran Strategis : Peningkatan Manajemen Pengurangan Bencana/Kebakaran

Kebakaran merupakan salah satu kasus bencana yang menimbulkan kerugian baik berupa materi, luka bahkan hingga kematian. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang kebakaran terjadi pula pada lahan kosong. Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cenderung kering menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering mengalami kebakaran. Selain itu, luasan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencapai hampir 45% dari wilayah DIY ditambah lagi ketersediaan pos pemadam kebakaran yang hanya 1 pos, menjadi tantangan sendiri dalam pencapaian sasaran strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran.

Untuk itu dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut, BPBD memiliki UPT Pemadam Kebakaran. UPT Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan kebakaran wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Tabel 3 21. Jumlah Pos, Kendaraan dan SDM Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul

No.	Keterangan	Satuan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Unit	1	1	1	1	1	1	2	2
2.	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran	Unit	4	4	4	4	4	4	6	8
3.	Jumlah Petugas pemadam kebakaran	Orang	24	24	24	24	24	24	24 THL 6 outsourcing	31 orang

Sepanjang Tahun 2025, UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul mencatat sebanyak **59 kejadian** kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, **41 kejadian** berhasil ditangani dengan waktu respons maksimal 15 menit, sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran. Capaian ini menunjukkan komitmen BPBD dalam meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan penanganan kebakaran kepada masyarakat.

Dampak kejadian kebakaran selama Tahun 2025 tercatat memengaruhi **169 jiwa**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi perhatian serius

bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas penanganan kebakaran.

Dalam mendukung pelaksanaan layanan kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul didukung oleh 31 personel Pemadam Kebakaran, dengan 14 personel di antaranya telah memiliki sertifikasi pemadam kebakaran. Keberadaan personel bersertifikasi menjadi faktor penting dalam menjamin profesionalisme, keselamatan, dan kualitas penanganan kejadian kebakaran di lapangan.

Tabel 3 22. SDM Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul

PNS	CPNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Outsourcing
3	1	8	11	8

Tabel 3 23. Daftar Personil Yang Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	NO. SERTIFIKAT	Status
1	Ag. Heri Prasetyo	Diklat dan Sertifikasi bagi SATGAS DAMKAR pelaksana pemula (Fire Fighter 1)	03/364.1/020/P/IV.3/35/2015	PPPK
2	Herpra Supriyanto	Diklat dan Sertifikasi bagi SATGAS DAMKAR pelaksana pemula (Fire Fighter 1)	03/364.1/024/P/IV.3/35/2015	PPPK
3	Rachmadany Alfian	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan IX	P.30/399/TU/DAMKAR/MPBK/2024	PPPK
4	Totok Tarjana	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan IX	P.62/399/TU/DAMKAR/MPBK/2024	PPPK
5	Heri Santosa	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan IX	P.27/399/TU/DAMKAR/MPBK/2024	PPPK
6	Subaryadi	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan IX	P.57/399/TU/DAMKAR/MPBK/2024	PPPK
7	Agus Indratmoko	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.31/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK
8	Jarwan	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.65/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW
9	Agus Susanta	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.32/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW
10	Dwi Sulistianto	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.39/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW
11	Kuswanto	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.68/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK
12	Tomi Handoko	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.32/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW
13	Arindja Kensiliantoro	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.9/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	NO. SERTIFIKAT	Status
14	Sawal Bariyadi	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.31/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025	PPPK PW

Tabel 3 24. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran

No	Penanganan	Jumlah Kejadian
1	Ditangani oleh UPT Damkarmat	59 layanan
2	Ditangani oleh Redkar	16 layanan
	Jumlah	75 layanan

Dari database terkait aspek mutu pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) diperoleh informasi bahwa pelayanan kebakaran dilakukan oleh UPT Damkarmat dan relawan pemadam kebakaran. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase kejadian bencana kebakaran tertangani} &= \frac{\text{jumlah kejadian bencana/kebakaran tertangani}}{\text{jumlah kejadian bencana/kebakaran dalam satu tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{110}{110} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani diukur dengan membandingkan jumlah kejadian bencana/kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana/kebakaran dalam satu tahun. Tertangani disini adalah bahwa korban bencana terpantau, tercatat, terbantu dalam keadaan darurat hingga ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu dari komponen di atas ada, menunjukkan bahwa korban bencana telah dapat tertangani.

Tabel 3 25. Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran

No	Indikator Kinerja	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran							100	Sangat tinggi	100	100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100 % termasuk kategori sangat tinggi.

Gambar 3 17. Dokumentasi Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran



1. Program Kegiatan Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran



Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul

Gambar 3 18. Grafik Kejadian Kebakaran Pada Setiap Kapanewon Tahun 2025



Mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 pasal 3, salah satunya pelayanan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Pada Tahun 2025, UPT Damkarmat telah melaksanakan pelayanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 59 kejadian. Dimana rincian rata-rata waktu tanggap sebagai berikut:

Tabel 3 26. Rincian Rata-Rata Waktu Tanggap/Respon Time

Total Waktu Tanggap	870 menit
Total Kejadian Kebakaran	59 kejadian
Rata – rata Respon Time	14,75
Total Kejadian Kebakaran yang Dilayani dalam Respon Time	41 kejadian



Kegiatan Penyelamatan Non Kebakaran

Selain melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, guna mencapai sasaran strategis ini, UPT Pemadam Kebakaran memiliki tugas melakukan penyelamatan non kebakaran. Selama tahun 2025, kegiatan penyelamatan yang telah dilakukan sebanyak 260 kali, berupa evakuasi binatang, membantu pelepasan cacing, penyemprotan/pembersihan lapangan/lahan, maupun evakuasi pohon tumbang.

Gambar 3 19. Jenis Kegiatan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2025

No	JENIS PENYELAMATAN	JUMLAH
1	MANUSIA	8
2	ULAR	80
3	TAWON	40
4	KUCING	24
5	SAPI	12
6	KAMBING	8
7	BIAWAK	7
8	MUSANG	1

No	JENIS PENYELAMATAN	JUMLAH
11	KELABANG	1
12	BURUNG	1
13	AYAM	1
14	CINCIN	22
15	POHON	17
16	MOBIL	15
17	PENYEMPROTAN JALAN	9
18	KUNCI	4



No	JENIS PENYELAMATAN	JUMLAH
9	MONYET	6
10	ANJING	1

No	JENIS PENYELAMATAN	JUMLAH
19	ORANG TERSESAT	1
20	LAINNYA	2
	TOTAL	260



Peningkatan Kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran

Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dalam pasal 20 menyatakan untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur pemadam kebakaran, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3 27. Daftar Personil Yang Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran

Tahun 2025

No	Nama	Jenis Diklat	No. Sertifikat
1	Jarwan	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.65/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025
2	Agus Susanta	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.32/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025
3	Dwi Sulistianto	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.39/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025
4	Kuswanto	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.68/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025
5	Tomi Handoko	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.32/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025
6	Arindja Kensiliantoro	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.9/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025
7	Sawal Bariyadi	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan VI	P.31/121/TU/DAMKAR/MPBK/2025
8	Agus Indratmoko	Diklat Pemadam I Program 70 JP Angkatan III	P.31/66/TU/DAMKAR/MPBK/2025



Pembentukan Relawan Kebakaran Tingkat Kalurahan

Tabel 3 28. Pembentukan Relawan Kebakaran Tahun 2025

No	Tanggal	Lokasi
1	15-16 Mei 2025	Kalurahan Sodo, Paliyan
2	5-6 Agustus 2025	Kalurahan Plembutan, Paliyan

Gambar 3 20. Pembentukan Relawan Kebakaran Tahun 2025



Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan inspeksi/pendataan peralatan proteksi kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan penghuni, melindungi aset dari kerugian materi, serta memastikan sistem proteksi aktif dan pasif berfungsi maksimal, serta mendeteksi potensi bahaya, memastikan kepatuhan regulasi, serta memverifikasi kesiapan alat pemadam kebakaran (APAR, sprinkler, alarm).

Gambar 3 21. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Tahun 2025



Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran

Permasalahan

1. Ketersediaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/pos pemadam kebakaran belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pemadam Kebakaran
3. Terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran/penyelamatan non kebakaran

4. Terbatasnya anggaran pemadam kebakaran/penyelamatan non kebakaran
5. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul

Solusi

1. Memberikan kemampuan kepada masyarakat di dalam menanggulangi kebakaran di tingkat lingkungan
2. Meningkatkan kegiatan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengenal kebakaran dan proses penanggulangan kebakaran dan pencegahannya, pengenalan alat-akat pemadaman, dan cara penggunaannya
3. Memberikan bantuan teknis melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya
4. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang bersifat wajib bagi pemilik bangunan gedung dan bersifat sukarela
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pemadam kebakaran melalui diklat teknis
6. Penambahan sarana prasarana pemadam kebakaran
7. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang penambahan SDM pemadam kebakaran

3

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis BPBD berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul No 700.1.2.7/Ev.LKj/24

tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, menunjukkan bahwa nilai AKIP BPBD adalah 83,73. Hal ini berarti akuntabilitas kinerja akippada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 “Memuaskan” yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa BPBD dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Namun demikian dari laporan tersebut, BPBD perlu menindaklanjuti rekomendasi dari penilaian AKIP.

Gambar 3 22. Rapat-Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan dan Tindak Lanjut Rekomendasi



Pada tahun anggaran 2025 juga dilaksanakan kegiatan untuk menindaklanjuti pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja No 20/LHP/XVIII.Yog/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 Atas Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dan Instansi Terkait Lainnya Di Wonosari.

Dari keseluruhan tindak lanjut LHP BPK tersebut, BPBD sudah menindaklanjutinya. Namun demikian masih ada beberapa yang perlu dilengkapi, diantaranya adalah penetapan regulasi rencana kontijensi setiap bencana yang telah dibuat, dan

1. Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

1. Rapat koordinasi rutin pejabat struktural dan fungsional setiap hari Senin, dan waktu-waktu lain apabila diperlukan guna memecahkan masalah dan merencanakan kegiatan.
2. Menyusun rencana aksi untuk Tahun Anggaran 2025
3. Menyusun Rencana Operasional Program Kegiatan/ROPK setiap sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja/KAK setiap sub kegiatan TA 2025
5. Mengidentifikasi dan menetapkan konteks resiko strategis dan daftar risiko kecurangan atas pengelolaan Pemerintahan Daerah (ekspedisi 2-08)
6. Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul (Keputusan Kepala Pelaksana BPBD No 033/KPTS/2023)
7. Melakukan reviu SOP yang sudah ada dan melengkapi SOP yang belum dibuat.

[illegible]

8. Menerbitkan surat keputusan pendukung pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, seperti SK PPTK, SK PPKom, SK PPK, SK PP, dan SK tim lainnya
9. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh penyedia maupun swakelola di aplikasi sirup.

Selain yang tersebut di atas, BPBD Kabupaten Gunungkidul juga melakukan banyak kegiatan lain guna mencapai target capaian nilai akuntabilitas kinerja. Masyarakat bisa memantaunya melalui website www.bpbdkab.go.id, media sosial BPBD (instagram, facebook, tiktok, x). Masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan dan permasalahan di bidang kebencanaan melalui aplikasi e-lapor.

Tabel 3 29. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,48
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,65
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,35
Jumlah		100%	83,73

Gambar 3 24. Surat Tindak Lanjut LHE AKIP

The image shows three copies of the 'Surat Tindak Lanjut LHE AKIP' (Follow-up Letter for AKIP LHE) from the Gunungkidul Regency Disaster Management Agency. The letters are addressed to various officials and contain specific instructions for improvement based on the 2024 performance evaluation results. The first letter is dated April 2025, the second is dated June 2025, and the third is dated August 2025. Each letter includes the name of the recipient, their position, and the specific areas for improvement.

Tabel 3 30. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024			
NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONTROL/TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA BPBD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja seperti : RPJPD, RPJMD, Renstra, DPA, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU; dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen rencana aksi atas kinerja telah tersedia. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain: a. Dokumen rencana aksi belum optimal mendukung kinerja disebabkan belum menyajikan perubahan rencana aksi. b. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai disebabkan rencana aksi yang disajikan belum menyajikan rencana aksi setelah perubahan anggaran	Rekomendasi a. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja b. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai	Akan ditindaklanjuti dengan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai
2	PENGUKURAN KINERJA BPBD telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlaksanaan, pemantauan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja belum didasarkan pada perjanjian kinerja perubahan	Direkomendasikan memastikan keselarasan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan	Akan ditindaklanjuti dengan menyelaraskan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONTROL/TINDAK LANJUT
3	PELAPORAN KINERJA BPBD telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan laporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.	Tidak terdapat rekomendasi	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	Tidak terdapat rekomendasi	

Wonosari, 29 April 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul

BUDIKWONO, S.TP, M.Si
NIP. 196503251990031004

Tabel 3 31. Analisis Perhitungan Capaian Kinerja

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Analisa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Semester 1 th 2025 : 82,19 dan semester 2 : 80,63. Tahun 2025 nilai IKM rata-rata : 81,41
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	$= \frac{\sum \text{Realisasi pemenuhan administrasi perkantoran}}{\sum \text{administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$ $= \frac{277}{277} \times 100\%$ $= 100\%$

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Analisa
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\sum \text{Realisasi pemenuhan sarana dan prasarana}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$ $= \frac{127}{127} \times 100\%$ $= 100\%$
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase aparatur sipil taat kode etik	$\frac{\sum \text{ASN PD yang taat kode etik}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100\%$ $= \frac{22}{22} \times 100\%$ $= 100\%$
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yang disusun}} \times 100\%$ $= \frac{13}{13} \times 100\%$ $= 100\%$
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan renstra PD terhadap RPJMD	$\frac{\sum \text{program dalam Renja PD yang sama dengan RKPD}}{\sum \text{program dalam RKPD}} \times 100\%$ $= \frac{4}{4} \times 100\%$ $= 100\%$
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap program dalam RPJMD	$\frac{\sum \text{program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD}}{\sum \text{program dalam RPJMD}} \times 100\%$ $= \frac{4}{4} \times 100\%$ $= 100\%$

Tabel 3 32. Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No	Indikat or Kinerja Progra m	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025*)				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai AKIP PD	82,25	82,35	83,61	83,73	82,5	83,73	101,34		83,5	83,5
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran								83,13			

*) Menggunakan nilai AKIP 2024, Nilai AKIP PD tahun 2025 belum keluar

Guna mensosialisasikan capaian kinerja yang telah dilakukan, setiap Senin pada minggu pertama (awal bulan) dilaksanakan apel besar yang diikuti oleh seluruh karyawan BPBD Kabupaten Gunungkidul. Dalam apel tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul capaian kinerja pada bulan sebelumnya dan target yang harus dicapai pada bulan berjalan. Capaian kinerja juga disosialisasikan pada saat rapat koordinasi.

Gambar 3 25. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Capaian Kinerja



2. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Permasalahan

- Terbatasnya anggaran pemenuhan sarana dan prasarana penunjang
- Terbatasnya SDM baik secara kualitas dan kuantitas

Solusi

- Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mengatasi permasalahan yang ada
- Pengusulan penambahan SDM

Capaian Kinerja Lainnya

BPBD Kabupaten Gunungkidul selain mengampu sasaran strategis yang sudah dipaparkan di atas, juga bertanggungjawab pada IKU Bupati Gunungkidul yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan pencapaian SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

IKU BUPATI : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



Dalam mewujudkan Misi I Bupati Gunungkidul yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan dinamis” maka perlu adanya pemenuhan capaian sasaran daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat agar terus meningkat. Peningkatan ini didukung dengan adanya penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Untuk mewujudkan target penurunan indeks resiko bencana, diperlukan indikator yang disepakati. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks resiko bencana. Terdapat 71 (tujuh puluh satu) indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks resiko bencana.

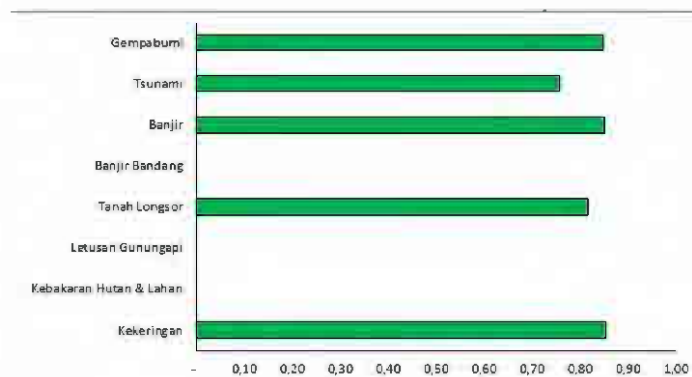
Pada tahun 2025 target nilai IKD di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,80, dan berdasarkan hasil penilaian nilai IKD Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 adalah 0,81. Hal ini tertuang dalam surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3 33. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025

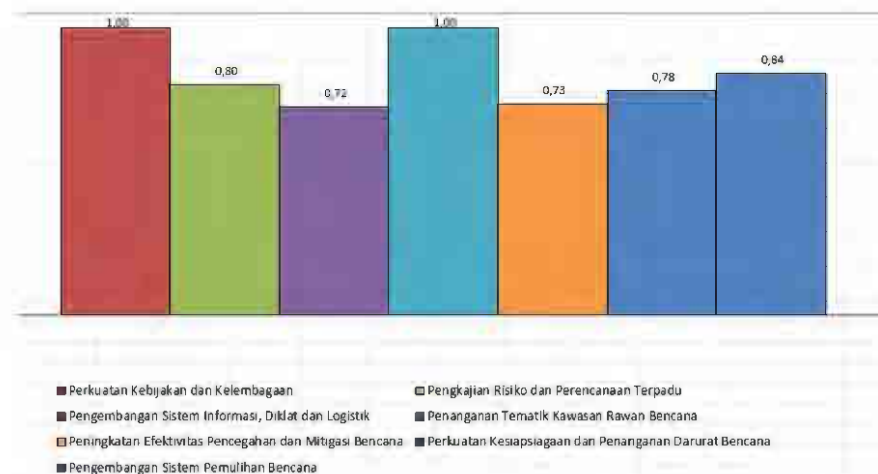
No.	Prioritas	Indeks Prioritas			Indeks Kapasitas Daerah			Tingkat Kapasitas Daerah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,95	0,94	1,00	0,73	0,77	0,81	SEDANG	SEDANG	TINGGI
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00	1,00	0,80						
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77	0,79	0,72						

No.	Prioritas	Indeks Prioritas			Indeks Kapasitas Daerah			Tingkat Kapasitas Daerah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,90	1,00	1,00						
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,67	0,71	0,73						
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,58	0,69	0,78						
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,84	0,71	0,84						

Gambar 3 26. Indeks Ketahanan Daerah Spesifik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024



Gambar 3 27. Indeks Per Komponen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

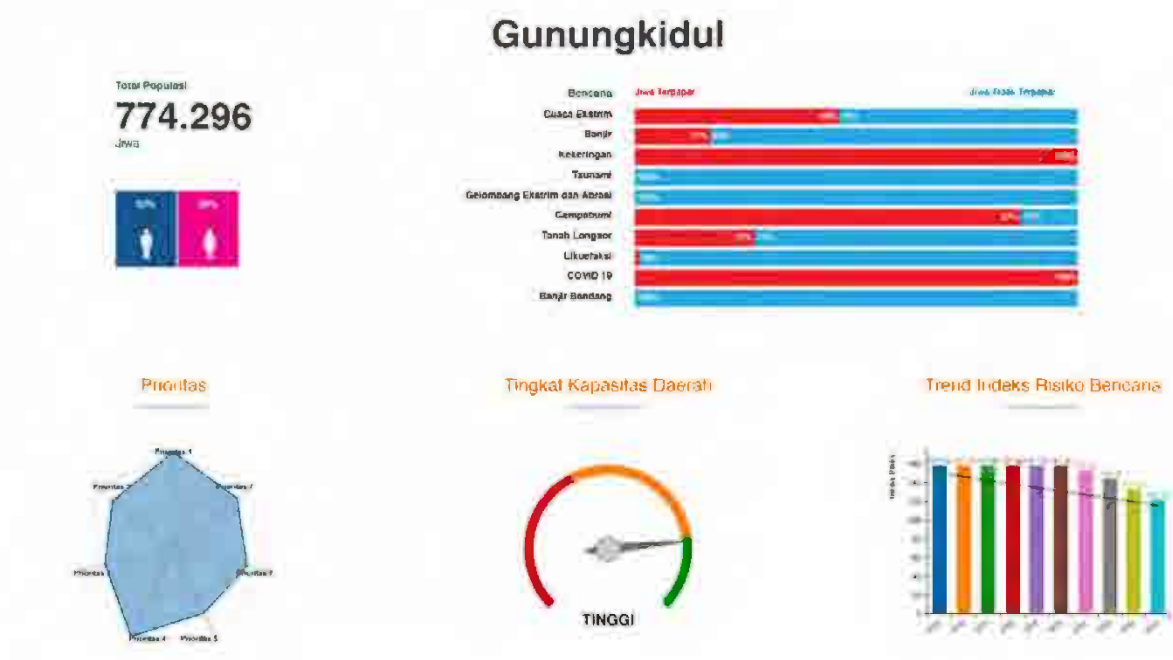


Tabel 3 34. Indeks Prioritas Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	Gempa bumi	Tsunami	Banjir	Banjir Bandang	Tanah Longsor	Letusan Gunungapi	Kebakaran Hutan & Lahan	Kekeringan
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00	0,85	0,76	0,85	-	0,82	-	-	0,85
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80								
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,72								
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00								
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,73								
	Gempabumi	0,10								
	Tsunami	0,07								
	Banjir	0,39								
	Banjir Bandang	-								
	Tanah Longsor	0,08								
	Letusan Gunungapi									
	Kebakaran Hutan & Lahan	-								
	Kekeringan	0,10								
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,78								
	Gempabumi	0,03								
	Tsunami	0,12								
	Banjir	0,06								
	Banjir Bandang	-								
	Tanah Longsor	0,04								
	Letusan Gunungapi	-								
	Kebakaran Hutan & Lahan	0,03								
	Kekeringan	0,05								
	Indikator Generik	0,46								
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,84								



Gambar 3 28. Tingkat Kapasitas Gunungkidul dalam Menghadapi Bencana



Tabel 3 35. Nilai IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2025

No	Provinsi /Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja PB	2022	2023	2024	2025	Kelas
1	Kab. Gunungkidul	IKD	0,66	0,73	0,77	0,81	Tinggi
2	Kab. Sleman	IKD	0,60	0,70	0,77	0,79	Sedang
3	Kab. Bantul	IKD	0,50	0,58	0,72	0,78	Sedang
4	Kota Yogyakarta	IKD	0,62	0,68	0,69	0,75	Sedang
5	Kab. Kulonprogo	IKD	0,63	0,65	0,64	0,67	Sedang

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul paling tinggi dibandingkan nilai IKD Provinsi DIY ataupun Kabupaten/Kota di DIY.

Indeks Risiko Bencana (IRB)

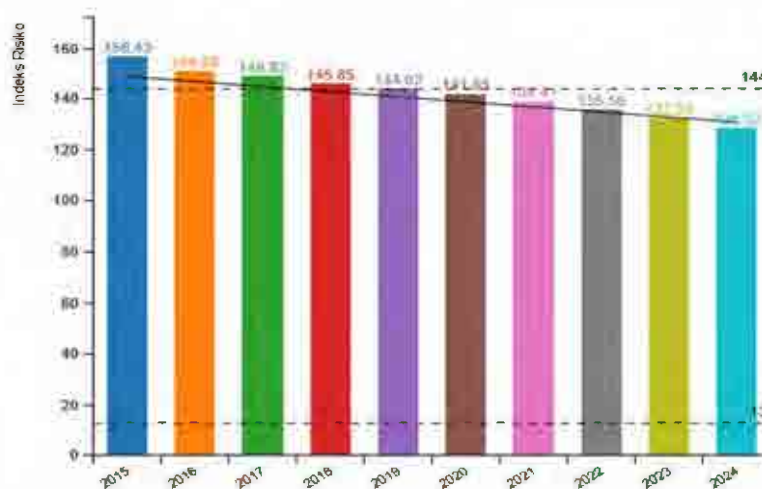
Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam

menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Semakin rendah nilai indeks risiko bencana maka semakin kecil tingkat kebencanaan di suatu daerah. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Gunungkidul dibanding Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3 36. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Bantul	121,70	106,80	129,50	96,02
2	Kab. Kulon Progo	104,62	101,41	152,65	107,52
3	Kab. Sleman	82,45	71,09	73,35	102,26
4	Kab. Gunungkidul	76,51	68,56	94,43	86,94
5	Kota Yogyakarta	62,18	59,99	64,22	51,79

Gambar 3 29. Indeks Risiko Bencana Rata-Rata Nasional



Tabel 3 37. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul di Banding Rata-Rata Nasional

Keterangan	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gunungkidul	76,51	68,56	94,43	86,94
Rata-Rata Nasional	97,40	117,78	Proses	

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul mencapai 98,55%.

Tabel 3 38. Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						98.55 %
1	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				(80%)	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	776926	776926	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)				(20%)	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	70	70	0	100.00 %
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	30	30	0	100.00 %



	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	8	8	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8	8	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	86	86	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
2	PELAYANAN Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					97.64 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				(80%)	80.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	495036	495036	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)				(20%)	17.64 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					88.20 %
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100.00 %



	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	7	7	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	7	7	0	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	100	100	0	100.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	100.00 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	6	6	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	30	30	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	27	27	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	50	50	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %

	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	30	30	0	100.00 %
	2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	200	200	0	100.00 %
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	12	12	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %

	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	29.18 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	221	78	143	35.29 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	200	41	159	20.50 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	221	78	143	35.29 %
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	121	31	90	25.62 %
3	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA					98.00 %
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
Download SK Yang Telah Di Upload 3403-20260112091003SK SIAGA HIDRO BASAH 2025-2026.pdf						
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	996	996	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)				-20%	18.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00 %

	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	581	581	0	100.00 %
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	24	24	0	100.00 %
	2 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	0	70.00 %
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	1	1	50.00 %
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	365	365	0	100.00 %
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12	0	100.00 %
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00 %
	3 . Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0.01	0.01	0	100.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0.01	0.01	0	100.00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12	0	100.00 %
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	24	24	0	100.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100.00 %

h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	24	24	0	100.00 %
---	-------	----	----	---	----------

Tabel 3 39. Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						96.94 %
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)						97.16 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	169	169	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					(20%)	17.16 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					85.78 %
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59	41	18	69.49 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5	5	0	100.00 %
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	149	149	0	100.00 %
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	31	14	17	45.16 %
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan	Orang	59	59	0	100.00 %

	evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran					
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	2	2	0	100.00 %

Realisasi dan Efisiensi Anggaran

1. Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif dan Responsif Meningkatkan

Tabel 3 40. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana yang Terencana, Integratif, dan Responsif Meningkatkan

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program Penanggulangan Bencana					
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.230.000	25.629.732	600.268	97,71	0,04
Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	588.185.000	576.122.148	12.062.852	97,95	0,41
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.614.770.800	1.445.098.104	169.672.696	89,49	0,06
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	559.118.496	478.092.604	81.025.892	85,51	1,80
Jumlah	2.788.304.296	2.524.942.588	263.361.708	90,55	9,45

Sasaran Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat mencapai kinerja sebesar 101,11% dengan efisiensi anggaran 9,45% atau Rp 263.361.708,-. Efisiensi anggaran diperoleh pada penanggulangan bencana kekeringan yang pada tahun 2025 merupakan kemarau basah sehingga masyarakat tidak membutuhkan bantuan dropping air, juga pada pemberian stimulan rehabilitasi rekonstruksi.

Tabel 3 41. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif dan Responsif Meningkatkan

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	101,11	90,55	$101,11 : 90,55 = 1,12 : 1$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Pada tahun anggaran 2025, tingkat capaian kinerja sebesar 101,11% dengan tingkat penyerapan anggarannya adalah 90,55%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(101,11 : 90,55) = 1,12 : 1$, dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,12 unit kerja.

2. Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran

Guna memenuhi sasaran strategis ini, tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.199.150.250,- Dengan realisasi anggaran seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 42. Realisasi Anggaran Program Sasaran Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	1.109.606.000	1.076.873.245	32.732.755	97,05	2,95



Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.560.000	1.454.000	106.000	93,21	6,79
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	87.984.250	86.774.048	1.210.202	98,62	1,38
Jumlah (2)	1.199.150.250	1.165.101.293	34.048.957	97,16	2,84

Sasaran Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 2,84% atau Rp 34.048.957,00. Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa biaya perjalanan dinas dalam kota.

Tabel 3 43. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100	97,16	100: 97,16 = 1:1,03

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator ini, tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 97,16%, dengan capaian kinerja sebesar 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100: 97,16) = 1:1,03$ dalam artian bahwa penggunaan 1,03 unit anggaran menghasilkan 1 unit kinerja.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Tabel 3 44. Anggaran dan Realisasi Serapan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	48.618.100	44.163.987	4.454.113	90,84	9,16
Admintrasi Keuangan PD	1.884.411.209	1.644.373.614	240.037.595	87,26	12,74
Admintrasi Kepegawaian PD	162.605.527	152.283.666	10.321.861	93,65	6,35
Admintrasi Umum PD	196.722.300	187.971.316	8.750.984	95,55	4,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.229.174.500	1.212.393.772	16.780.728	98,63	1,37
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.438.210	216.888.295	49.549.915	81,40	18,6
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	934.139.000	896.878.853	37.260.147	96,01	3,99
Jumlah	4.722.108.846	4.354.953.503	367.155.343	92,22	7,78

Realisasi anggaran untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD mencapai 92,22% dengan efisiensi anggaran 7,78% atau Rp 367.155.343,00. Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tagihan listrik, dan pemeliharaan kendaraan.

Tabel 3 45. Analisis efisiensi

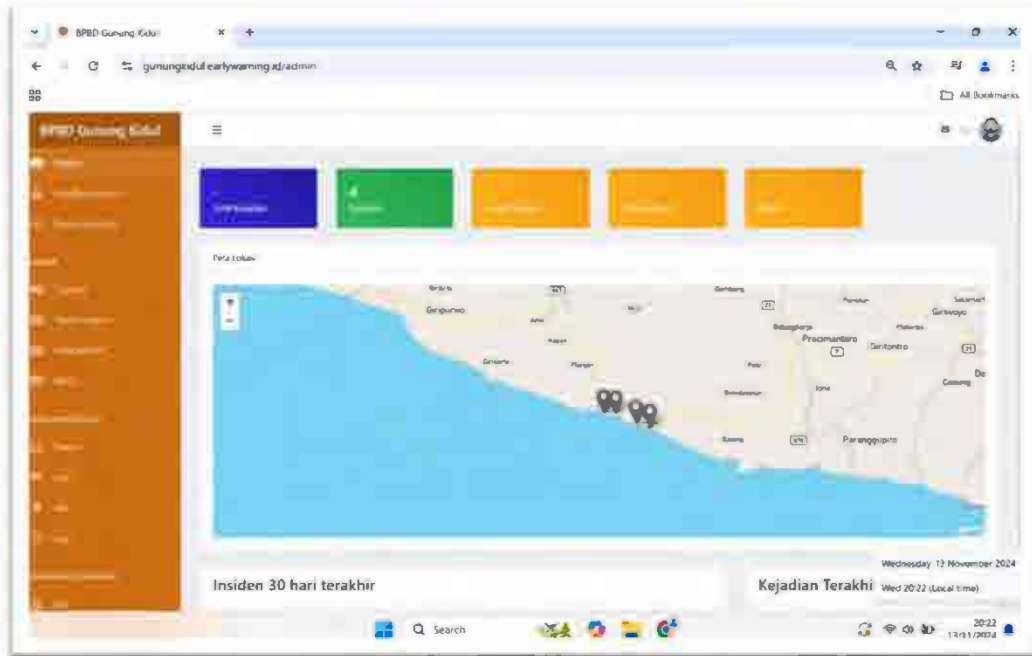
Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	101,34	92,22	$100,42 : 92,22 = 1:1,04$

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD mencapai kinerja sebesar 101,34 % dan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 92,22% maka

efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran ini adalah $(101,34: 92,22) = 1 : 1,10$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,10 unit kerja.

Inovasi

Gambar 3 30. Dashboard EWS Tsunami



Gambar 3 31. EWS Banjir



Penghargaan Yang Diperoleh

Gambar 3 32. Penghargaan yang Diperoleh



BAB IV PENUTUP



Penyelenggaraan kegiatan di BPBD pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Kesimpulan

Hasil laporan kinerja BPBD tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam periode tahun 2025, Sasaran Persentase penanganan bencana mencapai kinerja sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 90,55% dengan efisiensi anggaran 9,45% atau Rp 263.361.708,-. Sasaran Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani mencapai kinerja sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,16% dan efisiensi anggaran 2,84% atau Rp 34.048.957,-
- b. Beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah:
 - 1) Dokumen kajian sudah tersusun namun belum dilegalisasi dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan/masyarakat
 - 2) belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional;
 - 3) perlunya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat
 - 4) perlunya dukungan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPBD



Langkah Perbaikan Kinerja

Sedangkan untuk tindak lanjut dari strategi mengatasi hambatan pada tahun 2025, BPBD Kabupaten Gunungkidul telah menyusun kegiatan prioritas, yaitu:

- a. Penyusunan regulasi dan review standar operasional prosedur terkait penanggulangan bencana
- b. Pemenuhan kelengkapan kerja TRC, Pusdalops, dan petugas pemadam kebakaran sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah (BNPB)
- c. Melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait penanganan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

Lampiran

Lampiran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 antara lain:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. LHE AKIP Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024
4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024
5. Surat dari BNPB tentang Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dari BNPB)iku



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦥꦤꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤꦁꦧꦺꦤꦕꦤꦢꦫꦺꦴꦃ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id, Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

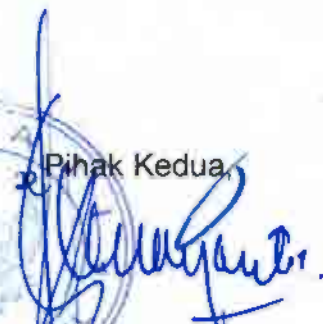
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Pihak Kesatu,

PURWONO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana/kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran	Persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	Persen	61,81
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	Persen	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp.	2.531.779.336	APBD
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	1.260.063.800	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.716.232.917	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUNARYANTA



Pihak Kesatu,



PURWONO





Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394091
Laman bpbdd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbdd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARNO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025



Pihak Kesatu,

SUBARNO, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	dokumen	7
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Disusun	laporan	30
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Asn Terfasilitasi Administrasi Kepegawain	orang	22
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Perangkat Daerah Tersedia	jenis	8
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Barang Milik Daerah	unit	127
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedia	jenis	4
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	jenis	5

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.716.232.917	APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 48.420.000	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.883.338.907	APBD

1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	145.527.900	APBD
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	138.223.900	APBD
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	543.039.000	APBD
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	266.238.210	APBD
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	691.445.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,



SUBARNO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT BASUKI, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBARNO, S.Sos

Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

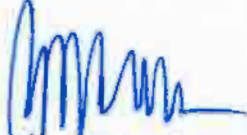
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,


SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,


RAHMAT BASUKI, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36
2.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5
3.	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6
4.	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2
5.	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
6.	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2
7.	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
8.	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24
9.	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
10.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
11.	Terselenggaranya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30
12.	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26

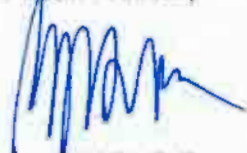
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2
14.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
15.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96
16.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
17.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20
18.	Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12
19.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25
20.	Terselenggaranya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1
21.	Terselenggaranya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1
22.	Terselenggaranya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 16.830.000	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 93.141.900	APBD
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 35.556.000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.357.000	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52.810.000	APBD

6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.435.000	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	22.169.900	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.400.000	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	3.840.000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	46.212.000	APBD
11.	Pengadaan Mebel	Rp.	126.718.000	APBD
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	98.781.000	APBD
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	317.540.000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	150.000	APBD
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	124.242.310	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	141.845.900	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	427.700.000	APBD
18.	Pemeliharaan Mebel	Rp.	1.200.000	APBD
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	184.970.000	APBD
20.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp.	41.300.000	APBD
21.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	34.475.000	APBD
22.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	1.800.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,



RAHMAT BASUKI, S.IP



အာသကဝိဓံကျာအာသကသေဉာဒ်

Telepon (0274) 394091

Laman bpbid.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbid@gunungkidulkab.go.id

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Amme

SUBARNO, S.Sos

RNA WIDIASTUTI, A.

ERNA WIDIASTUTI, A.Md

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
2.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14
7.	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7
8.	Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308
9.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14

Sub Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	37.970.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	1.320.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	800.000	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	1.330.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.	1.030.000	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	1.785.000	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.185.000	APBD
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.822.533.907	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	29.560.000	APBD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	31.245.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,



ERNA WIDIASTUTI, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394091
Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025



Pihak Kedua,

PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,

NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(4)	(5)	(6)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	Persen	100
1.1	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten tersedia	dokumen	24
1.2	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jenis	2
1.3	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	dokumen	3

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.086.679.336	APBD
1.1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 28.750.000	APBD
1.2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 370.466.700	APBD
1.3 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 687.462.636	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Ketiga,



NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARYANTO, S.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kesiapsiagaan Bencana Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua

NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,

SUHARYANTO, S.H

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KESIAPSIAGAAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	660
2.	Terselenggaranya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	60
3.	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	3

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	80

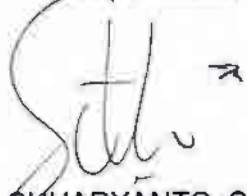
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 28.750.000	APBD
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 177.430.000	APBD
3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 15.670.000	APBD
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp. 43.970.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,


NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,


SUHARYANTO, S.H

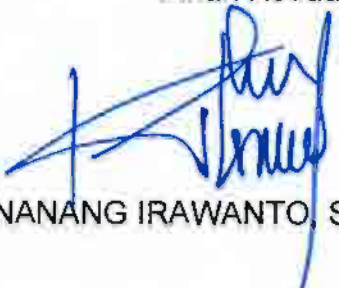
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2
2.	Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2
3.	Terselenggaranya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1
4.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1
5.	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Rp. 71.341.700	APBD
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 62.055.000	APBD
3. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 18.640.000	APBD
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp. 5.310.000	APBD
5. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.900.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,


NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,


AGUS WIBAWA ARIFANTO, ST, M.Eng

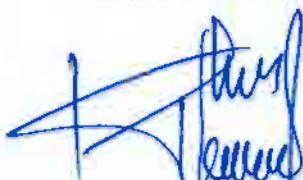
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	4

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 641.612.636	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,


 NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,


 AANG MA'RUF PERDANA, A.Md

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	persen	100
1.1	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan kejadian bencana	kejadian	200

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.445.100.000	APBD
1.1 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 1.445.100.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025



Pihak Kedua,

PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,

SUMADI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦧꦤꦤꦥꦤꦤꦁꦸꦭꦁꦤꦤꦼꦩꦏꦤ꧀ꦢꦤꦼꦫꦤ꧀

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP
Jabatan : Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,

ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	550

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 156.690.000	APBD

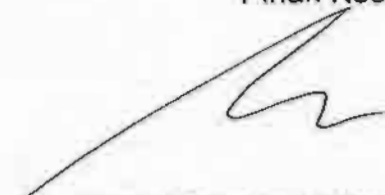
Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,



ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	12
2.	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	106
3.	Terselenggaranya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	4

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 230.965.000	APBD
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Rp. 46.200.000	APBD
3. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.011.245.000	APBD

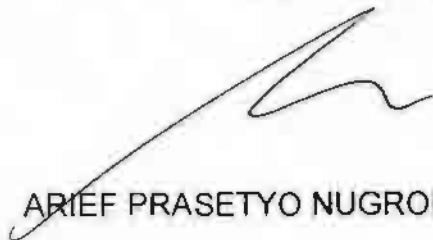
Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,



ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase capaian pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100
1.1	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	lokasi	50
1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen inspeksi peralatan proteksi bencana	dokumen	1
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran setiap tahunnya	orang	30

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pencegahan, Penanggulangan,	Rp. 1.260.063.800	APBD
1 Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
1.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.213.482.800	APBD
1.2 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp. 2.710.000	APBD
1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 43.871.000	APBD

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,



HANDOKO, ST, M.Eng.



အာသာစင်္ဂါဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbdd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbdd@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGADIYONO, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOKO, ST, M.Eng.

Jabatan : Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,

75

HANDOKO, ST, M.Eng

Pihak Kesatu,

Amo

NGADIYONO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1
2.	Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12
3.	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	8
4.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	111
5.	Terselenggaranya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1
6.	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	1

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.470.000	APBD
2.	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.105.858.800	APBD
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp. 60.844.000	APBD
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 42.760.000	APBD
5.	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp. 2.710.000	APBD
6.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 21.935.500	APBD
7.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 21.935.500	APBD

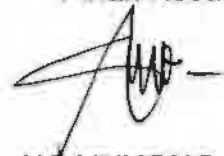
Wonosari, 12 Januari 2025

Pihak Kedua,



HANDOKO, ST, M.Eng.

Pihak Kesatu,



NGADIYONO, S.IP



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦒꦺꦴꦤꦠꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P.

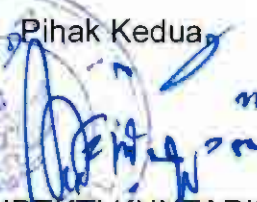
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

PURWONO, S.IP, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana/kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran	Persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Persentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	Persen	61,81
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	Persen	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Program		Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.788.304.296	APBD
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.199.150.250	APBD

Program	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
3. Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.722.108.846	APBD



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu,



PURWONO, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦥꦤꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARNO, S.Sos

Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025



Pihak Kedua,

PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,

SUBARNO, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	dokumen	7
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Disusun	laporan	30
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Asn Terfasilitasi Administrasi Kepegawain	orang	22
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Umum Perangkat Daerah Tersedia	jenis	8
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Barang Milik Daerah	unit	127
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedia	jenis	4
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	jenis	5

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.722.108.846	APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 48.618.100	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.884.411.209	APBD

1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	162.605.527	APBD
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	196.722.300	APBD
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.229.174.500	APBD
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	266.438.210	APBD
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	934.139.000	APBD

Wonosari, 7 September 2025



Pihak Kedua,

PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,

SUBARNO, S.Sos



Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394091
Laman bpbdd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbdd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGADIYONO, S.IP
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBARNO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,

SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,

NGADIYONO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108
2.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5
3.	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4
4.	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2
5.	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
6.	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2
7.	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
8.	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24
9.	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
10.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
11.	Terselenggaranya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	42
12.	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	137

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9
14.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
15.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96
16.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
17.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20
18.	Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12
19.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25
20.	Terselenggaranya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1
21.	Terselenggaranya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3
22.	Terselenggaranya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 39.870.000	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 97.215.527	APBD
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 25.520.000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.357.000	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 127.691.000	APBD

6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	8.785.000	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	22.217.300	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.400.000	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	4.065.000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	27.207.000	APBD
11.	Pengadaan Mebel	Rp.	157.508.000	APBD
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	509.706.500	APBD
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	561.960.000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	150.000	APBD
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	124.242.310	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	142.045.900	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	441.950.000	APBD
18.	Pemeliharaan Mebel	Rp.	1.200.000	APBD
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	184.970.000	APBD
20.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp.	43.800.000	APBD
21.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	259.519.000	APBD
22.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	2.700.000	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,



NGADIYONO, S.IP



Laman bpb.d.gunungkidulkab.go.id; Posel bpb.d@gunungkidulkab.go.id

ERNA WIDIASTUTI, A.Md

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
2.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14
7.	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7
8.	Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308
9.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 36.810.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.320.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 800.000	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.330.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 1.030.000	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.785.000	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.543.100	APBD
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.839.265.409	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 29.760.000	APBD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 15.385.800	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



SUBARNO, S.Sos

Pihak Kesatu,



ERNA WIDIASTUTI, A.Md

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(4)	(5)	(6)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	Persen	100
1.1	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten tersedia	jenis	2
1.2	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	dokumen	24
1.3	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	dokumen	3

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.173.533.496	APBD
1.1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 26.230.000	APBD
1.2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 588.185.000	APBD
1.3 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 559.118.496	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,



NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦤꦠꦤꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARYANTO, S.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kesiapsiagaan Bencana Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,


NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,


SUHARYANTO, S.H

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KESIAPSIAGAAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	660
2.	Terselenggaranya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	60
3.	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	3

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	80

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 26.230.000	APBD
2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp. 36.440.000	APBD
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 166.820.000	APBD
4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 14.770.000	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,


NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,


SUHARYANTO, S.H

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	5
2.	Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2
3.	Terselenggaranya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	3
4.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2
5.	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Rp. 314.820.000	APBD
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 55.335.000	APBD
3. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 210.110.000	APBD
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp. 15.905.000	APBD
5. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.900.000	APBD

Wonosari, 7 September 2025

Pihak Kedua,



NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,



AGUS WIBAWA ARIFANTO, ST, M.Eng



အာသာစေပါရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကတောင်းဆိုပါသည်။

Telepon (0274) 394091

Laman bpbid.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbid@gunungkidulkab.go.id

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AANG MA'RUF PERDANA, A.Md
Jabatan : Ketua Tim Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama : NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,

[Signature]

NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu.

Answer:-

AANG MA'RUF PERDANA, A.Md

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	4

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 311.203.496	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



NANANG IRAWANTO, ST.M.Ec.Dev

Pihak Kesatu,



AANG MA'RUF PERDANA, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDOKO, ST, M.Eng
Jabatan : Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,

HANDOKO, ST, M.Eng.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase capaian pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100
1.1	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	lokasi	50
1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen inspeksi peralatan proteksi bencana	dokumen	1
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran setiap tahunnya	orang	30

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Pencegahan, Penanggulangan,	Rp. 1.235.311.800	APBD
1 Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
1.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.199.150.250	APBD
1.2 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp. 1.560.000	APBD
1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 87.984.250	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,



HANDOKO, ST, M.Eng.



အာသာစုဂိဏ်ကျာအာစိစုစုစာလက?

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bcbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bcbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGADIYONO, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOKO, ST, M.Eng.
Jabatan : Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,

Handwritten signature: *[Signature]*

HANDOKO, ST, M.Eng

Pihak Kesatu,

Ans -

NGADIYONO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1
2.	Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12
3.	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	8
4.	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	168
5.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.	Terselenggaranya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1
7.	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	370
8.	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kalurahan	1

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.890.000	APBD
2.	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 982.322.000	APBD
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp. 80.784.000	APBD
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 43.060.000	APBD

- | | | | | |
|----|---|-----|------------|------|
| 5. | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. | 1.550.000 | APBD |
| 6. | Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Rp. | 1.560.000 | APBD |
| 7. | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Rp. | 67.898.750 | APBD |
| 8. | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Rp. | 20.085.500 | APBD |

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



HANDOKO, ST, M.Eng.

Pihak Kesatu,



NGADIYONO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	persen	100
1.1	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan kejadian bencana	kejadian	200

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.614.770.800	APBD
1.1 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 1.614.770.800	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



PURWONO, S.IP, M.Si

Pihak Kesatu,



SUMADI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦥꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦫꦃꦠꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 394091

Laman bpbid.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbid@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP
Jabatan : Plt. Ketua Tim Kerja Kedaruratan Bidang Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,

SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,

ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	12
2.	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	106
3.	Terselenggaranya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	4

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 225.095.000	APBD
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Rp. 45.950.000	APBD
3. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.049.475.800	APBD

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,


SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,


ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP



အာသာစေအိမ်ကျစာအောင်စာအောင်က?

Telepon (0274) 394091

Laman bpbd.gunungkidulkab.go.id; Posel bpbd@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP
Jabatan : Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,

Mr. De

SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,

ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA LOGISTIK DAN PERALATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	600

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 294.250.000	APBD

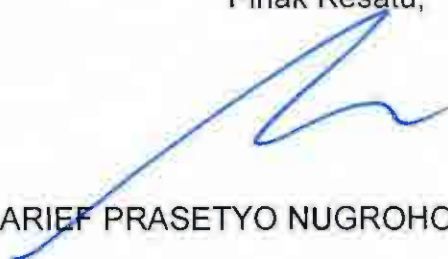
Wonosari, 3 September 2025

Pihak Kedua,



SUMADI, S.Sos

Pihak Kesatu,



ARIEF PRASETYO NUGROHO, S.Kom, MAP

PFCALAPSA, ANS-SEPC, AC, AN, NUP, INDIPLATOR, IN, INYDIA
 KALMAN, PP, H, J, W, N, T, H, L, N, L, A, P, B, P, N, C, K, A, J, G, U, D, P, U, M
 1996-1997

[illegible]

[illegible]

RENCANA AKSI PERUBAHAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Keterlambatan keterlambatan, dan keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD				Indeks Ketahanan Daerah	8.803 (nilai)	8.709.363.362	8.726.477.286		2.801.486.812		1.211.343.458	0,80 nilai	3.870.881.022	
						Nilai AKOP PD	83 nilai	8.722.108.888	8.007.104.289		8.704.600.432		8.773.187.050	83 nilai	1.547.217.873	
			1.05 01	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota	Presensi pegawai secara keseluruhan diatas 80persen atau terlaksana dengan baik	100 persen	8.722.108.888	8.007.104.289	25 persen	8.704.600.432	25 persen	8.773.187.050	25 persen	8.347.812.978	
			1.05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	7 dokumen	48.618.100	2 dokumen	13.790.000	1 dokumen	6.795.000	1 dokumen	12.305.000	3 dokumen	12.728.100
			1.05 01 2 01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	36.810.000	2 dokumen	10.780.000	1 dokumen	7.140.000	1 dokumen	9.040.000	3 dokumen	9.850.000 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
			1.05 01 2 01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.320.000	-	1 dokumen	600.000	-	720.000	-	- Subbagian Perencanaan dan Keuangan	
			1.05 01 2 01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	800.000	-	1 dokumen	800.000	-	-	-	- Subbagian Perencanaan dan Keuangan	
			1.05 01 2 01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.330.000	1 dokumen	1.030.000	-	-	1 dokumen	300.000	- Subbagian Perencanaan dan Keuangan	
			1.05 01 2 01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.030.000	-	-	2 dokumen	1.030.000	-	-	- Subbagian Perencanaan dan Keuangan	
			1.05 01 2 01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	1.785.000	4 laporan	925.000	2 laporan	200.000	4 laporan	460.000	200.000 Subbagien Perencanaan dan Keuangan	
			1.05 01 2 01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	5.543.100	2 laporan	1.055.000	2 laporan	1.055.000	2 laporan	1.055.000	1 laporan	2.378.100 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
			1.05 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan disusun	30 laporan	1.864.411.209	7 laporan	625.311.823	7 laporan	609.731.258	7 laporan	80.051.470	9 laporan	569.316.658
			1.05 01 2 02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang/bulan	1.836.265.409	88 orang/bulan	609.411.823	88 orang/bulan	599.271.258	86 orang/bulan	70.975.670	66 orang/bulan	559.606.658 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
			1.05 01 2 02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	29.760.000	-	8.330.000	-	4.840.000	-	7.240.000	1 laporan	9.350.000 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
			1.05 01 2 02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	15.385.800	4 laporan	7.570.000	4 laporan	5.620.000	4 laporan	1.835.800	2 laporan	360.000 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
			1.05 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi administrasi kepegawaian	22 orang	162.805.527	7 orang	30.985.760	5 orang	33.725.760	5 orang	24.865.760	5 orang	73.028.247
			1.05 01 2 05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	108 paket	39.670.000	36 paket	5.670.000	-	11.160.000	-	72	23.040.000	Subbagian Umum

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			1.05 01 2 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	5 dokumen	97.215.527	1 dokumen	25.315.760	1 dokumen	22.565.760	1 dokumen	24.965.760	2 dokumen	24.468.247	Subbagian Umum
			1.05 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	25.520.000	-	-	-	-	-	4 orang	25.520.000	Subbagian Umum	
			1.05 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan umum perangkat daerah tersedia	8 jenis	196.722.300	2 jenis	33.571.000	2 jenis	37.180.000	2 jenis	29.382.000	2 jenis	98.589.300	
			1.05 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	3.357.000	1 paket	1.726.000	1 paket	1.060.000	-	-	571.000	Subbagian Umum	
			1.05 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	127.691.000	1 paket	16.455.000	1 paket	20.670.000	1 paket	7.740.000	1 paket	82.626.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	8.785.000	-	1.120.000	-	1.500.000	1 paket	2.575.000	1 paket	3.590.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	22.217.300	1 paket	9.050.000	1 paket	4.700.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.467.300	Subbagian Umum
			1.05 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.400.000	6 dokumen	1.100.000	6 dokumen	600.000	6 dokumen	600.000	6 dokumen	1.100.000	Subbagian Umum
			1.05 02 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.065.000	3 laporan	500.000	3 laporan	750.000	3 laporan	1.000.000	3 laporan	1.615.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	27.207.000	3 laporan	3.620.000	3 laporan	7.700.000	3 laporan	13.467.000	3 laporan	2.420.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian barang milik daerah	127 unit	1.229.174.500	84 unit	193.458.000	43 unit	526.321.000	-	20.825.500	-	488.570.000	
			1.05 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 unit	157.508.000	30 unit	85.508.000	-	62.000.000	-	-	12	10.000.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 unit	509.706.500	26 unit	107.950.000	-	107.281.000	-	20.825.500	111	273.650.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	561.960.000	1 unit	-	1 unit	357.040.000	-	-	7 unit	204.920.000	Subbagian Umum
			1.05 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang administrasi perkantoran tersedia	4 jenis	266.438.210	1 jenis	58.138.543	1 jenis	73.292.304	1 jenis	66.970.020	1 jenis	68.037.343	
			1.05 01 2 08 0001	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	150.000	6 laporan	60.000	6 laporan	90.000	-	-	-	-	Subbagian Umum
			1.05 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	124.242.310	24 laporan	33.428.287	24 laporan	29.692.128	24 laporan	31.529.794	24 laporan	29.692.121	Subbagian Umum
			1.05 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	142.045.900	3 laporan	24.650.278	3 laporan	43.510.176	3 laporan	35.440.226	3 laporan	38.445.222	Subbagian Umum
			1.05 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	934.139.000	2 jenis	141.849.168	1 jenis	414.555.100	1 jenis	138.787.300	1 jenis	238.947.431	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	441.950.000	5 unit	108.474.169	5 unit	107.205.100	5 unit	107.887.300	5 unit	118.383.431	Subbagian Umum
			1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	1.200.000	-	-	-	-	-	12 Unit	1.200.000	Subbagian Umum	
			1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	184.970.000	6 unit	3.800.000	7 unit	102.700.000	8 unit	30.300.000	6 unit	48.170.000	Subbagian Umum
			1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	43.800.000	-	-	-	1 unit	-	-	-	43.800.000	Subbagian Umum
			1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	259.519.000	1 unit	29.275.000	2 unit	204.350.000	-	-	-	25.894.000	Subbagian Umum
			1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	2.700.000	1 unit	300.000	1 unit	300.000	2 unit	600.000	5 unit	1.500.000	Subbagian Umum
		Sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan responsif, berkelanjutan				Pembinaan Masyarakat Kelurahan (termasuk kelompok terdampak bencana) yang terencana, terpadu dan responsif, berkelanjutan	0,181 persen	2.704.304.300		387.163.000		838.184.200		554.783.450	0,181 persen	1.500.293.540	
			1.05.03.2.01.0007	Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana	Pembinaan Penanggulangan Bencana Yang Terencana	100 orang	3.705.304.300	25 persen	927.831.000	15 persen	130.184.200	12 persen	564.783.450	25 persen	1.500.293.540	
			1.05.03.2.01.0007	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten tersedia	2 jenis	26.230.000		7.890.000	1 jenis	300.000		18.040.000	1 jenis	-	
			1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	660 orang	26.230.000	220 orang	7.890.000	220 orang	300.000	220 orang	18.040.000			Kelompok Substansi Pencegahan Bencana
			1.05.03.2.02.0018	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	24 dokumen	586.185.000	6 dokumen	88.340.000	8 dokumen	166.435.000	6 dokumen	78.240.000	6 dokumen	253.170.000	
			1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	60 orang	36.440.000	-	-	30 orang	36.440.000	30 orang	-	-	-	Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana
			1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 kawasan	166.820.000	1 kawasan	88.340.000	1 Kawasan	61.890.000	1 kawasan	7.240.000	-	9.350.000	Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana
			1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 orang	14.770.000	-	-	80 orang	14.770.000	-	-	-	-	Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 dokumen	314.820.000	-	-	1 dokumen	71.000.000	4	243.820.000	Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana		
			1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 kawasan	55.335.000	-	2 kawasan	55.335.000	-	-	-	Kelompok Substansi Pencegahan Bencana		
			1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan kejadian bencana	200 kejadian	1.614.770.800	50	250.550.000	50	437.770.000	50	403.463.000	50	513.967.800	
			1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	1.049.475.800	1 dokumen	157.435.000	1 dokumen	197.665.000	1 dokumen	284.113.000	1 dokumen	410.262.800	Kelompok Substansi Kedaruratan
			1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	108 orang	45.950.000	-	108 orang	45.950.000	-	-	-	-	Kelompok Substansi Kedaruratan	
			1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 orang	294.250.000	120 orang	45.380.000	280 orang	148.890.000	120 orang	65.000.000	80 orang	35.000.000	Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan
			1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 laporan	225.095.000	3 laporan	56.755.000	3 laporan	45.265.000	3 laporan	54.370.000	3 laporan	58.705.000	Kelompok Substansi Kedaruratan
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun	3 dokumen	559.118.496	-	31.383.000	1 dokumen	229.679.290	-	64.400.458	2 dokumen	233.655.748	
			1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 dokumen	210.110.000	1 dokumen	2.450.000	-	107.640.000	-	-	2 dokumen	100.020.000	Kelompok Substansi Pencegahan Bencana
			1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	15.905.000	-	-	-	-	5.670.000	1 laporan	10.235.000	Kelompok Substansi Pencegahan Bencana	
			1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan	4 kegiatan	311.203.496	1 kegiatan	13.608.000	1 kegiatan	121.164.290	1 kegiatan	57.855.458	1 kegiatan	118.575.748	Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	21.900.000	1 dokumen	15.325.000	-	675.000	-	675.000	-	4.825.000	Kelompok Substansi Pencegahan Bencana
		Peningkatan manajemen penanganan bencana Kabupaten/Kota				Peningkatan kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100 persen	1.394.300.250	76 persen	242.300.000	25 persen	869.481.900	23 persen	273.992.950	23 persen	322.270.400	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			1.05.04.2.01	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian kebakaran	1003 person	1.109.490.000	25 person	242.205.000	15 person	340.596.400	10 person	237.049.700	15 person	289.754.900
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	60 lokasi	1.109.608.000	10 lokasi	242.205.000	15 lokasi	340.596.400	10 lokasi	237.049.700	15 lokasi	289.754.900
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	1.890.000	-	-	-	700.000	1 dokumen	1.190.000	UPT Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	982.322.000	3 laporan	204.195.000	3 laporan	289.534.400	3 laporan	210.799.700	3 laporan	277.792.900
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 orang	80.784.000	-	-	8 orang	49.562.000	-	24.000.000	7.222.000	UPT Pemadam Kebakaran
			1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sehat dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	168 unit	43.060.000	111 unit	38.010.000	-	1.500.000	-	57 unit	3.550.000	UPT Pemadam Kebakaran
			1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	1.550.000	-	-	1 dokumen	1.550.000	-	-	-	UPT Pemadam Kebakaran
			1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terselenggaranya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen inspeksi peralatan proteksi bencana	1 dokumen	1.560.000	-	-	-	-	1 dokumen	1.560.000	-	-
			1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terselenggaranya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1.560.000	-	-	-	-	1 dokumen	1.560.000	UPT Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran setiap tahunnya	30 orang	67.984.250	-	-	20.085.500	30 orang	36.943.250	-	30.955.500	-
			1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	370 orang	67.898.750	-	-	-	185 orang	36.943.250	185 orang	30.955.500	UPT Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
								TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			1.05042040002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 desa/kelurahan	20.085.500	-	1 desa/kelurahan	20.085.500	-	-	-	UPT Pemadam Kebakaran	
				Jumlah Pagu Anggaran				8.709.563.382		1.726.472.295		2.901.466.612		1.211.343.458		2.870.281.027

Wonosari, 03 September 2025





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

30 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di DI Yogyakarta

Yth. Gubernur DI Yogyakarta

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah DI Yogyakarta atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-381/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di DI Yogyakarta sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_DI_Yogyakarta_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB DI Yogyakarta Tahun 2025 sebesar **88,91** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta sebesar **0,76**;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Daerah DI Yogyakarta melalui BPBD DI Yogyakarta untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah DI Yogyakarta;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD DI Yogyakarta

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat

Nomor : B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di DI Yogyakarta

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bantul	0,78	96,02
Gunung kidul	0,81	86,94
Kota Yogyakarta	0,75	51,79
Kulon Progo	0,67	107,52
Sleman	0,79	102,26

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 315 /KPTS/2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/300.2.3.2/2945/B5 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Himbauan Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan pada Musim Hujan Tahun 2025/2026 di Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan pada musim hujan;
 - b. bahwa berdasarkan Prediksi Musim Hujan 2025/2025 Daerah Istimewa Yogyakarta rilisan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sleman tanggal 30 Oktober 2025 prediksi awal musim hujan 2025/2026 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya terjadi pada dasarian III Oktober 2025;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang, dan sambaran petir perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangan dan perlu adanya Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 31 October 2025





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Nomor : 700.1.2.7/Ev-LKj/24

Tanggal : 26 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 14 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7/Ev-LKJ/24
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/17 tanggal 16 Juli 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 83,73 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” yaitu Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	27,05	24,48
2. Pengukuran Kinerja	30	23,76	24,65
3. Pelaporan Kinerja	15	12,94	12,25
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	22,35
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,61	83,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen rencana aksi belum optimal mendukung kinerja disebabkan belum menyajikan perubahan rencana aksi;
- b. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung Kinerja yang ingin dicapai disebabkan rencana aksi yang disajikan belum menyajikan rencana aksi setelah perubahan anggaran.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu Target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja belum didasarkan pada perjanjian kinerja perubahan

3. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan /direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja;
- b. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai.

2. Pengukuran Kinerja

Direkomendasikan memastikan keselarasan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan

secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

အာသာစုဝိဇ္ဇာကျမ်းအစိတ်အပိုင်းများ

Jalan Siraman-Pulutan, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon (0274) 394091
Laman: bpbdd.gunungkidulkab.go.id, Posel: bpbdd@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 29 April 2025

Nomor : 900.1.6/221/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 berkas
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP pada BPBD Kabupaten Gunungkidul

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-LKj/24 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, maka dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut. (Terlampir)

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Gunungkidul,

Purwono, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196905251990031004

TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONFIRMASI TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
	BPBD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja seperti : RPJPD, RPJMD, Renstra, DPA, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU, dokumen sasaran kinerja pegawai dan dokumen rencana aksi atas kinerja telah tersedia. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain: a. Dokumen rencana aksi belum optimal mendukung kinerja disebabkan belum menyajikan perubahan rencana aksi b. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai disebabkan rencana aksi yang disajikan belum menyajikan rencana aksi setelah perubahan anggaran	Rekomendasi : a. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja b. Direkomendasikan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai	Akan ditindaklanjuti dengan menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dilaksanakan dapat mendukung kinerja yang ingin dicapai
2	PENGUKURAN KINERJA		
	BPBD telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja belum mendasarkan pada perjanjian kinerja perubahan	Direkomendasikan memastikan keselarasan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan	Akan ditindaklanjuti dengan menyelaraskan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.

NO	KONDISI/CATATAN	REKOMENDASI	KONFIRMASI TINDAK LANJUT
3	PELAPORAN KINERJA		
	BPBD telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan laporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.	Tidak terdapat rekomendasi	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	Tidak terdapat rekomendasi	

Wonosari, 29 April 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gunungkidul



PURWONO, S.IP, M.Si

NIP 196905251990031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦑꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦤꦤꦥꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤꦤꦼꦩꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Pulutan, Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul 55851
Telepon (0274) 394091 Faksimile (0274) 394091
Posel : bpbd@gunungkidulkab.go.id Laman : bpbd.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY BASUKI, M.Si
NIP : 196810091996031003
Jabatan : Plh Kepala Pelaksana
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini saya menyatakan :

Sanggup untuk menyelaraskan rencana aksi dengan perubahan anggaran sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan dapat mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 30 Juni 2025



Plh. Kepala Pelaksana

EDY BASUKI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196810091996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦑꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦒꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦠꦏꦁꦒꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦠꦏꦁꦒꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦠ

Jalan Wonosari-Pulutan, Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul 55851

Telepon (0274) 394091 Faksimile (0274) 394091

Posel : bpbd@gunungkidulkab.go.id Laman : bpbd.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY BASUKI, M.Si
NIP : 196810091996031003
Jabatan : Plh. Kepala Pelaksana
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini saya menyatakan :

Sanggup untuk memastikan keselarasan data kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 30 Juni 2025

Plh. Kepala Pelaksana

EDY BASUKI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196810091996031003



BPBD

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



0811 265 7113 - 0274 394091

Salam Tangguh, Salam Siaga, Siap Untuk Selamat